

363.728
HAR

s c

**STUDI EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PROGRAM REHABILITASI INSTALASI PENGOLAHAN LUPUR
TINJA (IPLT) DALAM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI KELURAHAN SUKAJAYA PALEMBANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

**BUDI HARIYANTO
L4D 002 008**



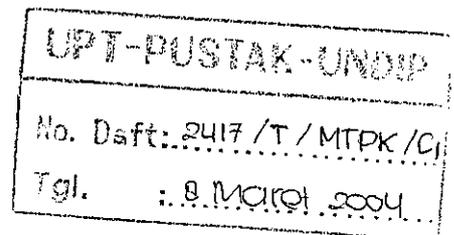
**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**STUDI EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PROGRAM REHABILITASI INSTALASI PENGOLAHAN LUPUR
TINJA (IPLT) DALAM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI KELURAHAN SUKAJAYA PALEMBANG**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

BUDI HARIYANTO
L4D 002 008



Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal September 2003

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, September 2003

Pembimbing Pendamping

Ir. Irawan Wisnu, MT

Pembimbing Utama

DR. Ari Pradhanawati, MS



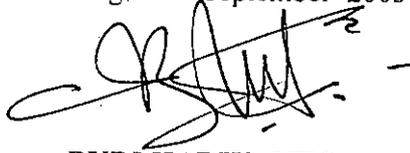
Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, September 2003



BUDI HARIYANTO
NIM L4D002008

" ...Tuhan,
... Semoga aku selalu ingin memberi daripada diberi,
... menolong daripada ditolong,
... memaafkan daripada dimaafkan,

karena...,
dengan memberi kita diberi...
dengan menolong kita ditolong...
dengan memaafkan kita dimaafkan... "

" Pembangunan itu ibarat air teh, membangun dengan melarutkan aspek lingkungan dan spasial di dalamnya maka akan menghasilkan teh manis yang dapat dinikmati setiap orang ".

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Ayahanda H. MATNI dan Ibunda RINDUWATI SY yang kuhormati dan kucintai, Adik-adikku tercinta yang kusayangi, seseorang yang mengisi hari-hariku belakangan ini, Teman-teman seperjuangan khususnya CBUIM V terimakasih atas dukungan moril selama ini. Semoga Allah SWT. melindungi kita semua. Amiiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil 'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah dan inayah-NYA, akhirnya tesis yang cukup melelahkan ini dapat selesai. Tema tesis mengenai Partisipasi Masyarakat (*people's participation*) ini berjudul "*Studi Efektivitas Partisipasi Masyarakat pada Program Rehabilitasi IPLT dalam upaya pengelolaan lingkungan di Kelurahan Sukajaya Palembang*". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas partisipasi masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan di Kelurahan Sukajaya Palembang, yang kelak diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan/arahan bagi Pemerintah Kota Palembang dalam program pembangunan yang bertumpu pada masyarakat

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengkhaturkan "terima kasih" yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta dan Ananda banggakan, atas limpahan doa dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
2. Ketua Proyek CPCO (*Capacity Building Urban Infrastructure Management*), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Magister Teknik Pembangunan Kota.
3. Drs.H. Husni, MM mantan Walikota Palembang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di Magister Teknik Pembangunan Kota dan Ir. Edi Santana Putra selaku Walikota Palembang yang sekarang yang memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi.
4. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
5. DR. Ari Pradhanawati, MS selaku pembimbing utama dan Ir. Irawan Wisnu, MT selaku pembimbing pendamping, yang telah berkenan meluangkan waktu guna memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan tugas dan kegiatannya.
6. Ir. Parfi Khadiyanto, MSL selaku pembahas yang telah berkenan memberikan masukan dan saran yang sangat berguna bagi penyempurnaan tesis ini.

7. Ir. Sunarti, MT selaku penguji yang telah berkenan memberi pementapan dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.
8. Para pengelola dan dosen pengajar Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
9. Teman-teman CBUIM V yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada gading yang tak retak. Demikian jua dengan karya ini, tentu tak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karenanya penulis sangat menghargai dan tetap mengharapkan segala tegur sapa dan sumbangan pikiran yang berarti bagi penyempurnaan karya ini. Kiranya DIA menerima segala amal kita bersama dan menilainya sesuai keikhlasan masing-masing.

Allohumma Amin

Semarang, September 2003

Penulis,

BUDI HARIYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Ruang Lingkup	10
1.5.1. Ruang Lingkup Materi/subtansial	10
1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah/spatial	12
1.6. Kerangka Pemikiran	15
1.7. Pendekatan dan metode pelaksanaan studi	18
1.8. Sistematika Penulisan	28
BAB II. KAJIAN TEORI PARTISIPASI DAN EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT	
2.1. Partisipasi Masyarakat	30
2.1.1. Pengertian Partisipasi	30
2.1.2. Kegunaan Partisipasi Masyarakat	33
2.1.3. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	34
2.1.4. Skala Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	36
2.1.5. Tipe-tipe Partisipasi Masyarakat	40
2.1.6. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat	43
2.1.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	46
2.2. Efektivitas Partisipasi Masyarakat	48
2.2.1. Pengertian Efektivitas	48
2.2.2. Tolok Ukur Efektivitas Partisipasi	50
2.3. Pengelolaan Limbah	53
2.3.1. Pengolahan Limbah Manusia (<i>Ekskreta</i>) dan Aspek Kesehatan Masyarakat	54
2.3.2. Sistem Pembuangan Limbah Tinja	55
2.3.3. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	56
2.4. Kaitan Antara Efektivitas Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Limbah Manusia (<i>Ekskreta</i>) di Perkotaan	57
BAB III. DESKRIPSI LOKASI DAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT DI WILAYAH STUDI	
3.1. Gambaran Umum Kota Palembang	60

3.2.	Kondisi Fisik Wilayah Kota Palembang	61
3.3.	Gambaran Umum Kelurahan Sukajaya Palembang.....	62
3.4.	Penduduk dan karakteristik masyarakat.....	63

BAB IV. ANALISIS EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM REHABILITASI IPLT DI KELURAHAN SUKAJAYA PALEMBANG

4.1.	Studi partisipasi masyarakat pada tahap program rehabilitasi IPLT	67
4.2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pada tahap rehabilitasi IPLT	88
4.3.	kajian tingkat efektivitas partisipasi masyarakat pada tahap rehabilitasi IPLT..	97

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1.	Kesimpulan	101
5.2.	Rekomendasi.....	105

DAFTAR PUSTAKA.....	108
----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	: Katagori Tinggi rendahnya masing-masing aspek.....	25
Tabel I.2.	: Skala Linkert untuk masing-masing katagori jawaban	25
Tabel II. 1.	: Skala Analisis Partisipasi Masyarakat.....	37
Tabel II. 2.	: Tangga Partisipasi Masyarakat	52
Tabel IV.1.	: Distribusi Parameter Partisipasi masyarakat dalam tahap Perencanaan	69
Tabel IV.2.	: Pengukuran Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan proyek rehabilitasi IPLT.....	72
Tabel IV.3.	: Katagori variabel tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap	73
Tabel IV.4.	: Distribusi Parameter Partisipasi masyarakat dalam tahap Pelaksanaan	81
Tabel IV.5.	: Pengukuran Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan proyek rehabilitasi IPLT.....	84
Tabel IV.6.	: Katagori variabel tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap	85
Tabel IV.7.	: Data – data pribadi responden.....	87
Tabel IV.8.	: Prosentase data responden di wilayah studi.....	89
Tabel IV.9.	: Hasil perhitungan chi square.....	91
Tabel IV.10	: Hasil uji probabilitas	92
Tabel IV.11	: Skala analisis partisipasi masyarakat di wilayah studi	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	: Peta Administrasi Kota Palembang.....	13
Gambar 1.2.	: Peta Kecamatan Sukarame Palembang	14
Gambar 1.3.	: Kerangka Pemikiran	17
Gambar 2.1.	: Bagan Proses Kepemimpinan	49
Gambar 2.2.	: Delapan tangga Peran Serta Masyarakat	51
Gambar 3.1.	: Peta Kelurahan Sukajaya Palembang	65
Gambar 3.2.	: Peta kondisi existing pelayanan IPLT tahun 2002.....	66
Gambar 4.1.	: Prosentase aktivitas partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan	70
Gambar 4.2.	: Prosentase tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan...	70
Gambar 4.3.	: Posisi partisipasi masyarakat di wilayah studi dalam tangga partisipasi masyarakat	78
Gambar 4.4.	: Prosentase aktivitas partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan.	82
Gambar 4.5.	: Prosentase tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan ...	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Lembar kuesioner IPLT

Lampiran B: Gambar kolam - kolam IPLT dan areal sekitar IPLT

Lampiran C: Hasil perhitungan dengan analisis *crosstab*

ABSTRAK

Salah satu bentuk pelestarian lingkungan hidup yang ada di perkotaan adalah pengelolaan limbah khususnya limbah manusia (ekskreta). Namun demikian selama ini, tugas pengelolaan limbah hanya tampak sebagai tugas pemerintah saja. Sehingga dengan demikian perlu keterlibatan masyarakat yang merupakan tolok ukur penting demi mengoptimalkan fungsi pengelolaan limbah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengetahui efektivitas partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi Unit Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam upaya pengelolaan lingkungan di Kelurahan Sukajaya Palembang. Adapun aspek yang dikaji dalam studi ini adalah masalah tingkat efektivitas partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek rehabilitasi IPLT.

Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Penelitian dalam studi ini adalah deskriptif dengan analisis kuantitatif yang didukung data-data kualitatif. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah cluster sampling atau sampling berkelompok dan digabung purposive sampling atau sampling bertujuan. Teknik pengolahan data hasil dari jawaban responden digunakan program SPSS (statistical product and service solution) untuk mempercepat proses pengolahan data. Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam tabulasi untuk mendapatkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi serta mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel, dianalisis berdasarkan Chi Square (X^2) hasil perhitungan dan chi square (X^2) tabel, kemudian dilanjutkan uji probabilitas untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil studi dan observasi di wilayah studi temuan-temuan yang diperoleh adalah, proses pembangunan rehabilitasi IPLT telah mengembangkan model partisipatif, meskipun terbatas, yakni dipahami oleh sebagian kecil warga masyarakat sehingga dapat dikategorikan kurang efektif, karena peran pemerintah dalam proyek rehabilitasi IPLT tersebut masih sangat besar. Karena proyek tersebut didanai oleh pemerintah dan pelaksanaannya bersifat sangat teknis maka segala biaya, tenaga dan materialnya sebagian besar telah disediakan pemerintah melalui kontraktor pelaksana yang telah menyediakan berbagai sumber daya, sehingga partisipasi masyarakat yang ada sangat terbatas

Proses partisipasi masyarakat di wilayah studi termasuk dalam tingkat Tokenisme, yaitu pelibatan masyarakat dalam bentuk informasi, konsultasi dan penentraman. Masyarakat diberikan informasi dan diajak konsultasi, namun segala keputusan tetap berada di tangan pemerintah. Jadi belum ada unsur kemitraan, pelimpahan kekuasaan ataupun kontrol masyarakat. Sedangkan bila melihat faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian, maka di wilayah studi cukup signifikan dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam studi ini adalah perlu adanya transparansi dan keterbukaan informasi dan perbaikan dalam metode partisipasi masyarakat agar metode tersebut dapat berjalan efektif.

ABSTRACT

One of environment preservation form in urban area is management waste particularly human excretion. It seems the responsibility of it belongs to the government. However, people's participation are also needed to optimize and the quality of environment.

The main aim of this study is to know how effectiveness community's participation in IPLT rehabilitation programme and the factors that influence the participation level as an effort to manage environment in Sukajaya village district Palembang. The aspect of this study are effectiveness problem of people's participation on planning phase and implementation of IPLT rehabilitation programme.

The research implementation and approach method in this study are descriptive by quantitative analysis that are supported qualitative data. Sample method are cluster sampling and purposive sampling. The respondent answer uses SPSS programme (statistical product product and service solution) to accelerate of the data processing process. Quantitative data are analyzed and presented in tabulation to get high-low participation level and to know relationship between variable. The analyze is based on chi square (χ^2) of score accounting and tabel chi square (χ^2) and probability test to definite influence factors in people's participation.

Based on in the study area, the result study and observation are found rehabilitation development process IPLT with participant model, but it is not effective. Because the people's understanding still is low and government role in the IPLT rehabilitation project still is high. Because this project is invested by government it's characteristic is so very technical that is supported by government and contractor. However, this project involves limited people's participation.

The people's participation process in Tokenism level are give information, consultation and placation. However all decision still in government control. It is not relationship, power authority or people's control. The influence people's participation factors are sex, age, knowledge, income and livelihood, in this study are it is comprehend and significant to participate.

The recommendation is needed by transparency, openness of information and repairing people's participation method to be effective.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya pertumbuhan perkotaan yang dibarengi dengan aktifitas yang tinggi di berbagai bidang oleh masyarakatnya membawa implikasi terhadap peningkatan produksi limbah, baik limbah domestik maupun limbah non domestik. Pengelolaan prasarana limbah perkotaan khususnya limbah tinja merupakan suatu rangkaian sistem kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan mewujudkan penyelenggaraan kebersihan dan kesehatan lingkungan di wilayah perkotaan.

Perkembangan dan pembangunan penyediaan prasarana pengolahan limbah khususnya limbah Tinja (*faeces*) di perkotaan telah mendapat perhatian serius berbagai pihak sehingga program-program pembangunan pengelolaan limbah perkotaan merupakan isu utama bagi pemerintah pusat maupun daerah (propinsi, kabupaten dan kota).

Kondisi “ isu “ ini muncul di karenakan kegagalan di beberapa daerah seperti Peristiwa penyegelan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) selama setahun oleh masyarakat Pesanggrahan di Provinsi Bali, yang merupakan bentuk dari penolakan masyarakat terhadap keberadaan IPLT karena IPLT tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan (Denpasar Post 14 Agustus 2002).

Pertumbuhan kota yang cepat, secara langsung berdampak pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Kurangnya pelayanan air bersih, sistem sanitasi yang baik, pengelolaan persampahan, penyediaan rumah dan transportasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan kota menjadi penyebab utama timbulnya berbagai masalah di kota-kota negara sedang berkembang.

Upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat kota yang bersifat heterogen merupakan tugas yang paling rumit bagi pemerintah. Dalam hal ini salah satu tugas penting pemerintah dalam hal memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan masyarakat kota adalah pengelolaan limbah khususnya limbah manusia (*faeces dan urine*), karena dampak negatif dari limbah tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan timbulnya berbagai penyakit yang lebih lanjut berakibat pada tercurahnya dana masyarakat untuk memulihkan kesehatan mereka.

Menurut Dirjen Cipta Karya Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 1999, di Indonesia hanya 55% kota metropolitan dan kota besar yang memiliki fasilitas pembuangan limbah tinja yang layak, sedang kota menengah dan kecil hanya 45% saja, 27 % nya masih dibawah standar kelayakan serta sisanya dibuang langsung ke parit, selokan dan sungai. Hal ini mengakibatkan kualitas air sungai dan air permukaan mengalami degradasi dengan cepat, khususnya di kota besar.

Pada umumnya prioritas yang diberikan untuk penanganan air limbah khususnya limbah rumah tangga di Kota Palembang masih rendah, hal ini merupakan akibat dari kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang arti pentingnya sanitasi disamping faktor-faktor lain seperti ; Institusi yang belum jelas, peraturan/standar dan norma yang masih terbatas, pendanaan dan pemeliharaan yang kurang memadai serta kordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang masih belum optimal.

Pada Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan dikatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk

hidup lainnya. Dari definisi tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh manusia apapun bentuknya, merupakan pengaruh terhadap mutu dan kualitas serta eksistensi hidup dan kehidupan, termasuk didalamnya adalah mutu dan kualitas lingkungan.

Salah satu prasarana perumahan dan pemukiman yang cukup penting dalam menjaga kesehatan lingkungan maupun masyarakat adalah prasarana dan sarana sanitasi khususnya sarana Pengolahan Lumpur Tinja (program jangka menengah sektor sanitasi Kota Palembang PJMPS-PSI Tahun 2001-2006).

Penyusunan Program Jangka Menengah ini bertujuan untuk menyiapkan program-program fisik maupun non fisik yang kan menunjang pengelolaan sanitasi masyarakat kota. Diantara program tersebut adalah rehabilitasi sarana IPLT. Program ini dikembangkan bertumpu kepada masyarakat, maka dengan ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat (PJMPS-PSI, 2001-2006).

Sistem sanitasi perkotaan di Kota Palembang diantaranya berupa IPLT dibangun sejak tahun 1996 yang merupakan salah satu *pilot project* sanitasi perkotaan dengan memperhatikan skenario pengembangan Kota Palembang (*Urban Development Scenario*) yang berisikan arah maupun prioritas pengembangan kota.

Penyusunan program pembangunan/ pengembangan sistem sanitasi perkotaan juga didasarkan atas evaluasi manfaat proyek yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, sosial ekonomi dan aspek lingkungan. Pelaksanaan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat berwawasan kota yang nyaman, aman dan bersih.

Di dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi di Kota Palembang Pemerintah Pusat melalui Pemerinta Kota Palembang pada

Tahun anggaran 1996/1997 telah mengalokasikan pembangunan unit pengolahan limbah tinja yang berlokasi di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame Palembang melalui sumber dana yang berasal dari APBD, bantuan Pemerintah Pusat dan pinjaman luar negeri. Dana yang berasal dari penerimaan retribusi dari APBD pada umumnya digunakan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan sistem, sedangkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan pinjaman luar negeri digunakan untuk investasi.

Unit pengolahan limbah tinja Sukajaya mempunyai kapasitas 12.000 m³ /tahun yang ekuivalen dengan 100.000 jiwa/tahun dan tingkat penggunaan baru mencapai 39,37 %. Pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang diperhitungkan baru mencapai 39,37 % dari kapasitas yang ada menunjukkan bahwa sekitar 60.000 jiwa belum memanfaatkan keberadaan fasilitas IPLT. Disamping itu masih rendahnya jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas *septik tank* serta MCK komunal. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DKK) Kota Palembang tahun 2001 jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas *septik tank* hanya 60,75 % dan MCK Komunal 3,9 %, sedangkan berdasarkan hasil SUSENAS tahun 1996, pengguna fasilitas *septik tank* sebesar 62 % dan MCK komunal 6 %. Disini nampak terjadi penurunan jumlah sarana sanitasi rumah tangga (PJMPST Tahun 2001-2006).

Dengan keterbatasan dana untuk biaya operasi dan pemeliharaan unit pengolahan limbah tinja dilokasi tersebut serta didasarkan pada paradigma peran pemerintah yang bukan lagi sebagai penyedia (*provider*) segala fasilitas namun sebagai pemberdaya (*enabler*), maka keterlibatan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi sangat diperlukan dalam program proyek rehabilitasi IPLT. Program ini memerlukan berbagai komponen yang saling terkait baik teknis, kelembagaan, keuangan

dan yang sangat berperan adalah melihat sejauh mana partisipasi pengguna manfaat prasarana.

Keterlibatan masyarakat ini penting, karena seringkali tampak bahwa dalam proses pembangunan para perencana dan pembangun menghadapi problem bahwa usaha-usaha yang mereka lakukan merupakan usaha sepihak, tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat terlebih dahulu. Namun demikian, kadangkala pula masyarakat telah diberi peluang agar berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan proyek-proyek tetapi amat sedikit yang hadir. Sifat apatis masyarakat didasarkan pada asumsi, bahwa mereka akan terlibat secara antusias di dalam suatu proses pembangunan bila mereka merasa bahwa keikutsertaannya mempunyai akibat yang bermakna dalam rencana-rencana akhir (Slamet, 1993 : 33-34).

Pada kenyataannya masih banyak orang memandang partisipasi semata-mata sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar alat *public relation* agar proyek tersebut berjalan tanpa hambatan. Karenanya, partisipasi masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga sebagai tujuan (*participation is an end itself*).

Banyak orang menolak diajak bicara, diskusi dan menghadiri rapat atau pertemuan, karena mereka mengetahui bahwa *final decision* bukan pada mereka tetapi pada orang yang mempunyai kekuasaan. Sementara itu, melalui partisipasi segala bentuk kegiatan atau pembangunan akan lebih demokratis. Jadi masyarakat tidak hanya menjadi obyek tetapi sebagai subyek pembangunan. Masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dan masukan dalam menentukan jenis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Priyono dan Pranaka (1996 : 54) mengemukakan

bahwa pada umumnya dapat dikatakan, Indonesia telah memasuki tahap kedua dalam pemerintahan demokrasi, yaitu tahap partisipatoris (*dari pemerintah bersama masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat dan untuk masyarakat*) dan di beberapa daerah, mungkin sudah mulai memasuki tahapan ketiga dalam pemerintahan demokrasi, yaitu tahapan emansipatif atau dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat sangat penting sebagaimana tertuang dalam publikasi PBB yang dikutip Hadi (1999 : 15) sebagai berikut :

“ *All people and all human being shall have the right to live in dignity and freedom to enjoy the fruits of social progress and should on their part, contribute to it* “. (United Nations : *Popular participation in Decision Making for Development*).

Secara harfiah kutipan diatas bermakna bahwa, masyarakat memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan dan seharusnya menjadi bagian dari proses pembangunan yang merupakan refleksi dari kontribusinya. Selanjutnya menurut Hadi (1999 : 19), bahwa pentingnya partisipasi masyarakat itu didasarkan atas beberapa alasan ; pertama, masyarakat berhak mengetahui tentang setiap rencana pembangunan yang secara potensial mempengaruhi kehidupan mereka. Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal (5) menyebutkan, bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang tersebut secara eksplisit memberi akses terhadap informasi tentang adanya proyek, program dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kedua, masyarakat adalah “ *local expert* ” tentang lingkungan disekitarnya, sehingga layak didengar pendapat dan gagasannya agar program dan proyek

yang akan dilakukan adalah *workable*. Ketiga keberlanjutan dari program-program dan kebijakan akan terjamin jika masyarakat diikutsertakan. Partisipasi masyarakat tersebut akan berhasil baik bila didasari akan kesadaran tanpa tekanan pihak manapun. Terlebih dengan kebutuhan dan sasaran mereka sendiri dan bukan hanya karena permintaan pemerintah untuk meningkatkan sumbangan mereka, baik berupa waktu, keahlian, pengetahuan, dana dan sebagainya. Hal ini dapat dicapai apabila mereka mempunyai keterkaitan dan rasa memiliki sasaran-sasaran dari suatu program pembangunan atau proyek tertentu, dimana jerih payah dan kontribusi mereka diakui, didorong dan didukung oleh kebijaksanaan pemerintah.

1.2. Perumusan Masalah

Berbagai kegiatan pembangunan yang dilancarkan dan cara bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan mencerminkan metode atau pendekatan pembangunan yang menunjukkan secara tidak langsung konsep para pembangun mengenai pembangunan masyarakat (Slamet, 1993 : 41). Sampai sekarang pun masih banyak anggapan bahwa dengan memberikan sebanyak-banyaknya bantuan pada masyarakat akan menjadi lebih baik taraf hidupnya, sudah barang tentu hal ini kurang mendidik dan malahan menciptakan rasa ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga dengan demikian kemandirian masyarakat dalam pembangunan menjadi kurang. Salah satu metode untuk menciptakan kemandirian masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Perlunya partisipasi masyarakat disekitar lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) pada tahap rehabilitasi IPLT adalah disamping untuk meningkatkan kualitas

lingkungan hidup masyarakat, juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang berwawasan kota, yaitu kota yang nyaman, aman dan bersih (PJMPSP-PSI, 2001-2006).

Hal yang terpenting disamping hal tersebut diatas adalah dengan mengikutsertakan masyarakat berarti meningkatkan posisi tawar masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat perlu diperhatikan demi suksesnya pelaksanaan program. Masyarakat dapat mengawasi jalannya pelaksanaan program sehingga jikalau terdapat penyimpangan dapat dideteksi secara dini. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah khususnya limbah tinja di Kelurahan Sukajaya Palembang sangat dibutuhkan mengingat sebagai penghasil limbah terbesar masyarakat sudah semestinya ikut terlibat dalam proses pengelolaan limbah tinja tersebut. Masyarakat yang selama ini masih ada yang membuang hajat di sungai, selokan/parit, rawa, kebun atau tanah kosong, merupakan salah satu bentuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah. Perilaku tersebut apabila dibiarkan akan mempunyai dampak yang dapat mengakibatkan timbulnya penurunan kualitas dan pencemaran lingkungan.

Fokus yang disorot dalam penelitian ini adalah, apakah tahap rehabilitasi dari unit pengolah limbah tinja di kelurahan Sukajaya telah mengembangkan pola partisipatif yang efektif dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada tahap rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi Instalasi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi Unit Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Sukajaya Palembang dalam upaya pengelolaan lingkungan

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian ini merupakan suatu penelitian evaluasi dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui efektivitas partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi Unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Sukajaya Palembang.
2. Untuk mengkaji faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi IPLT di Kelurahan Sukajaya Palembang.

Adapun sasarannya adalah :

1. Mengidentifikasi dan menerangkan bentuk partisipasi masyarakat yang digunakan pada program rehabilitasi Unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada tahar rehabilitasi IPLT.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai partisipasi masyarakat pada tahap rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengelolaan limbah manusia (*Ekskreta*) khususnya limbah tinja di perkotaan, sehingga nantinya dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan melalui model partisipatif lebih banyak ditekankan sesuai dengan era otonomi daerah. Untuk itu manfaat yang dapat diperoleh dari studi ini adalah :

1. Sebagai masukan untuk pengembangan kajian ilmiah atau referensi bagi penelitian sejenis, khususnya masalah partisipasi (partisipasi) masyarakat.
2. Agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah kota Palembang dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan partisipatif.

1.5. Ruang Lingkup

1.5.1. Ruang Lingkup Substansial

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tingkat efektivitas partisipasi masyarakat pada tahap rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah tinja. Dengan tujuan untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas, perlu adanya batasan dan alat pengukurnya. Adapun batasan permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada tingkat efektivitas partisipasi masyarakat kelurahan Sukajaya pada tahap rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Batasan-batasan kegiatan yang dapat dilihat pada tingkat keterlibatan masyarakatnya adalah :

a. Tahap Perencanaan proyek rehabilitasi IPLT

Tahap perencanaan merupakan suatu pelibatan yang paling tinggi di dari masyarakat, karena melalui perencanaan, masyarakat dapat berperan serta dalam menentukan tujuan, merumuskan program, biaya, sumber biaya dan sebagainya sesuai dengan keinginan mereka.

Sedangkan tolok ukur/parameter partisipasi masyarakat dalam batas-batas kegiatan tersebut diatas meliputi :

- Frekuensi kehadiran dalam pertemuan
- Keaktifan dalam berdiskusi/mengemukakan usul
- Bentuk-bentuk usulan
- Keterlibatan dalam desain bangunan.

b. Tahap Pelaksanaan proyek rehabilitasi IPLT

Pengukurannya bertitik pangkal pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas riil dari program yang telah digariskan. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek.

Parameter-parameter yang dapat dilihat dalam tahapan ini adalah :

- Sumbangan tenaga
- Sumbangan uang
- Sumbangan material
- Masukan dalam perubahan desain.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada tahap rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kelurahan Sukajaya Palembang dapat datang dari peran aparat dan lembaga formal yang ada di kelurahan, LKMD, RT/RW dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, faktor interaksi dan komunikasi masyarakat yang ada serta faktor kemampuan dari masyarakat tersebut, yang aspek-aspeknya antara lain adalah :
- a. Sex/jenis kelamin
 - b. Usia
 - c. Tingkat pengetahuan
 - d. Tingkat pendapatan
 - e. Mata pencaharian

1.5.2: Ruang Lingkup Spatial/lokasi

Kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1.451.776 jiwa menurut hasil sensus penduduk tahun 2000 dengan luas wilayah 400,61 km² . Kelurahan Sukajaya dalam lingkup wilayah kecamatan Sukarame lebih kurang jaraknya 10 km dari pusat kota Palembang. Memiliki luas wilayah 540 Ha dengan rincian 254 Ha digunakan untuk perumahan/bangunan, 28 Ha berupa area persawahan, 185 Ha berupa tabah kering dan tanah pekuburan. Jumlah penduduk 20.895 jiwa yang terbagi dalam 10 Rukun Warga (RW), 60 Rukun Tetangga (RT) dan 4.454 Kepala Keluarga (KK). Bangunan IPLT berdiri dilahan seluas \pm 4 Ha. Berdasarkan Rencana Tata guna Lahan lokasi IPLT ini termasuk dalam kawasan permukiman terbatas.



**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

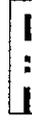
TESIS

STUDI EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PROGRAM REHABILITASI IPLT
DALAM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI KELURAHAN SUKAJAYA PALEMBANG

PETA

WILAYAH ADMINISTRASI
KOTA PALEMBANG

Legenda :

-  Batas Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Kelurahan
-  Jalan Lingkar / Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Sungai
-  Kantor Kecamatan
-  IPLT Sukejaya

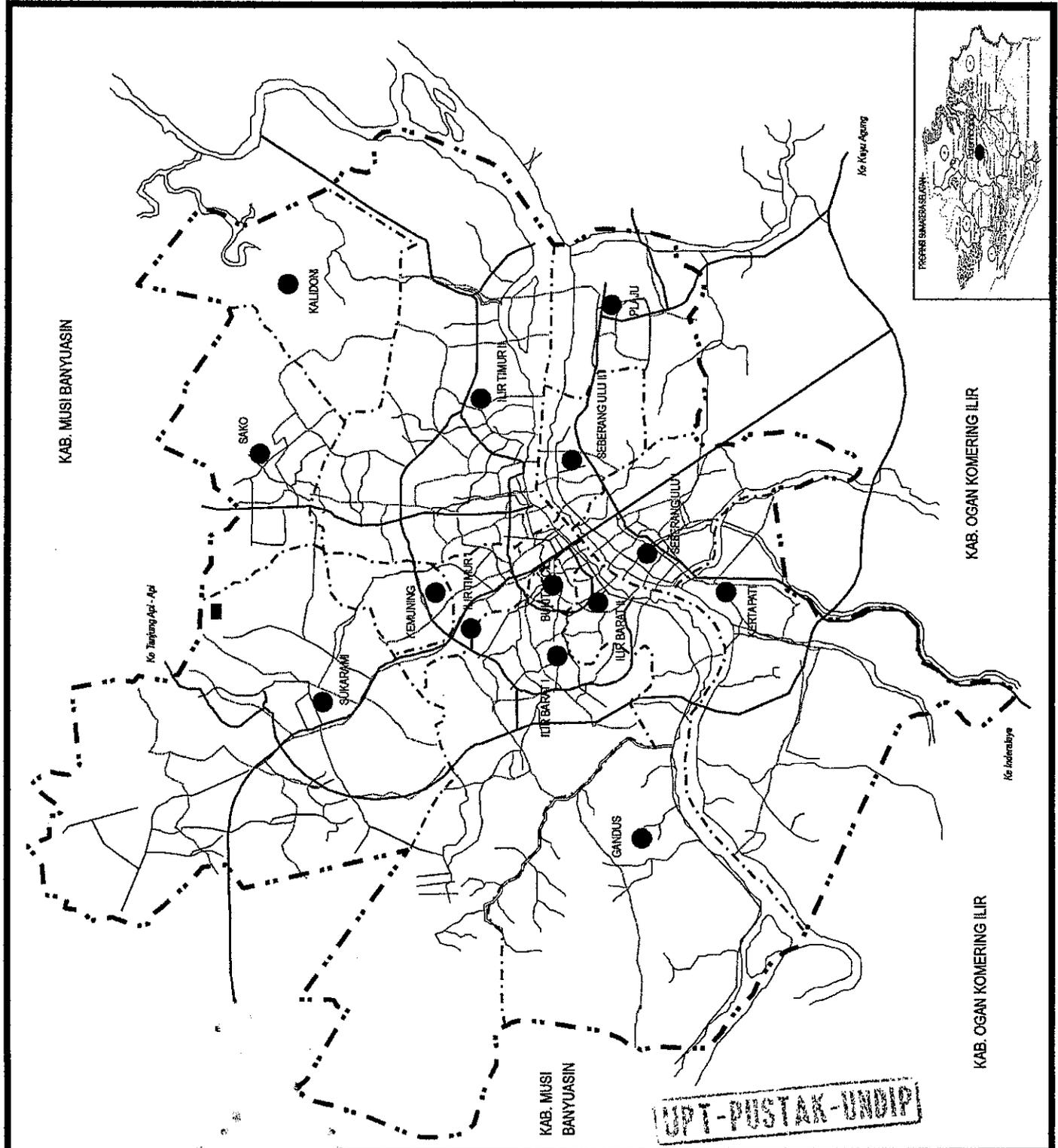


SKALA
1 : 125.000
0 2,5 50m

NO. GAMBAR
1,1

SUMBER

BAPPEDA KOTA PALEMBANG



UPI - PUSTAKA - UNDIP



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STUDI EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM
REHABILITASI JELET DALAM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI KELURAHAN SUKAJAYA PALEMBANG

PETA

KECAMATAN SUKARAME PALEMBANG
PROPINSI SUMATERA SELATAN

LEGENDA :

-  Batas Kecamatan
-  Jalan raya
-  Jalan kecil
-  Batas kelurahan
-  Kantor Lurah
-  IPLT Sukajaya
-  Kantor Camat Sukarame
-  Bandara SMB II

SUMBER

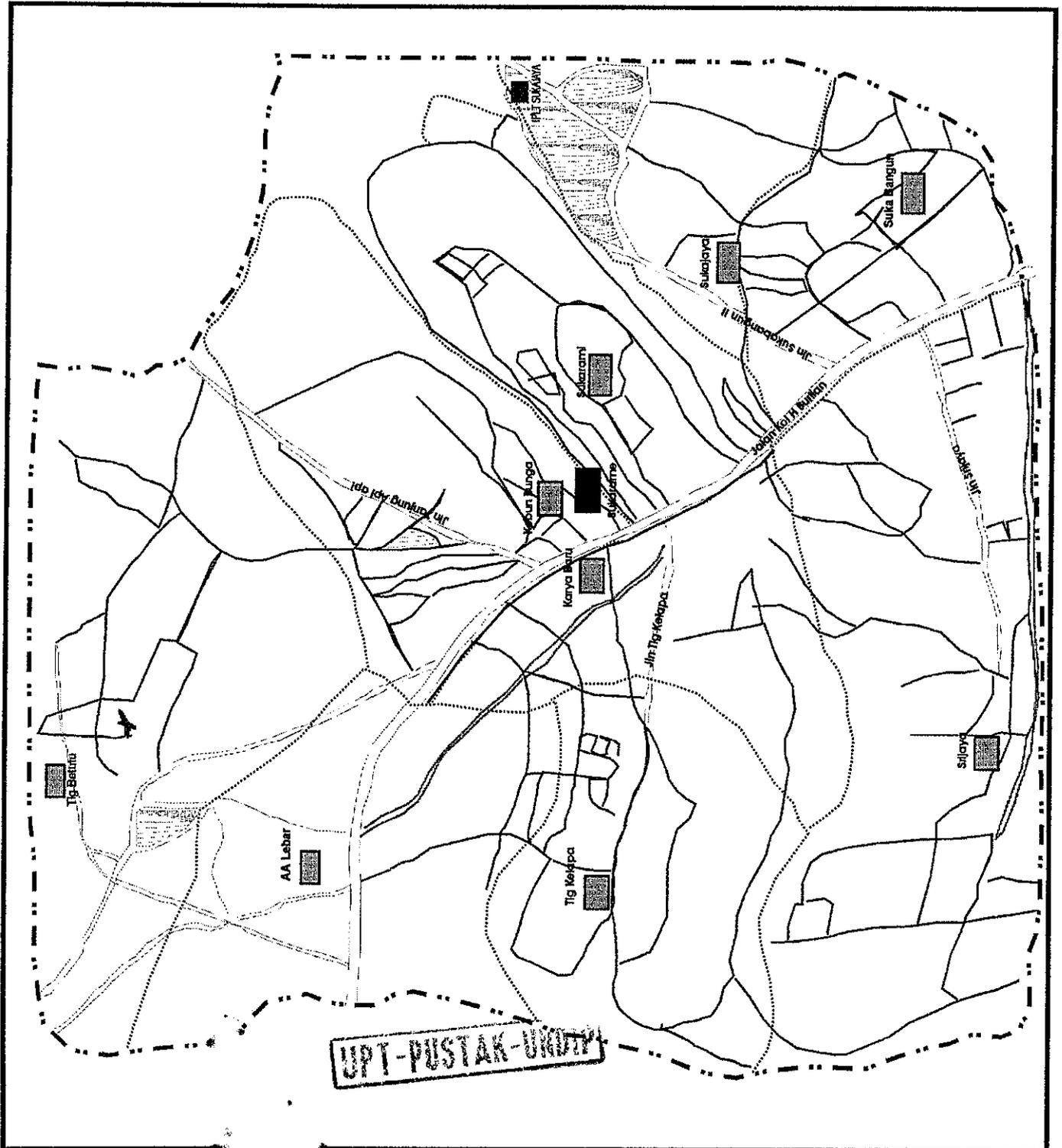
KECAMATAN SUKARAME KOTA PALEMBANG

NO. GAMBAR

SKALA

1 : 125.000

UTARA



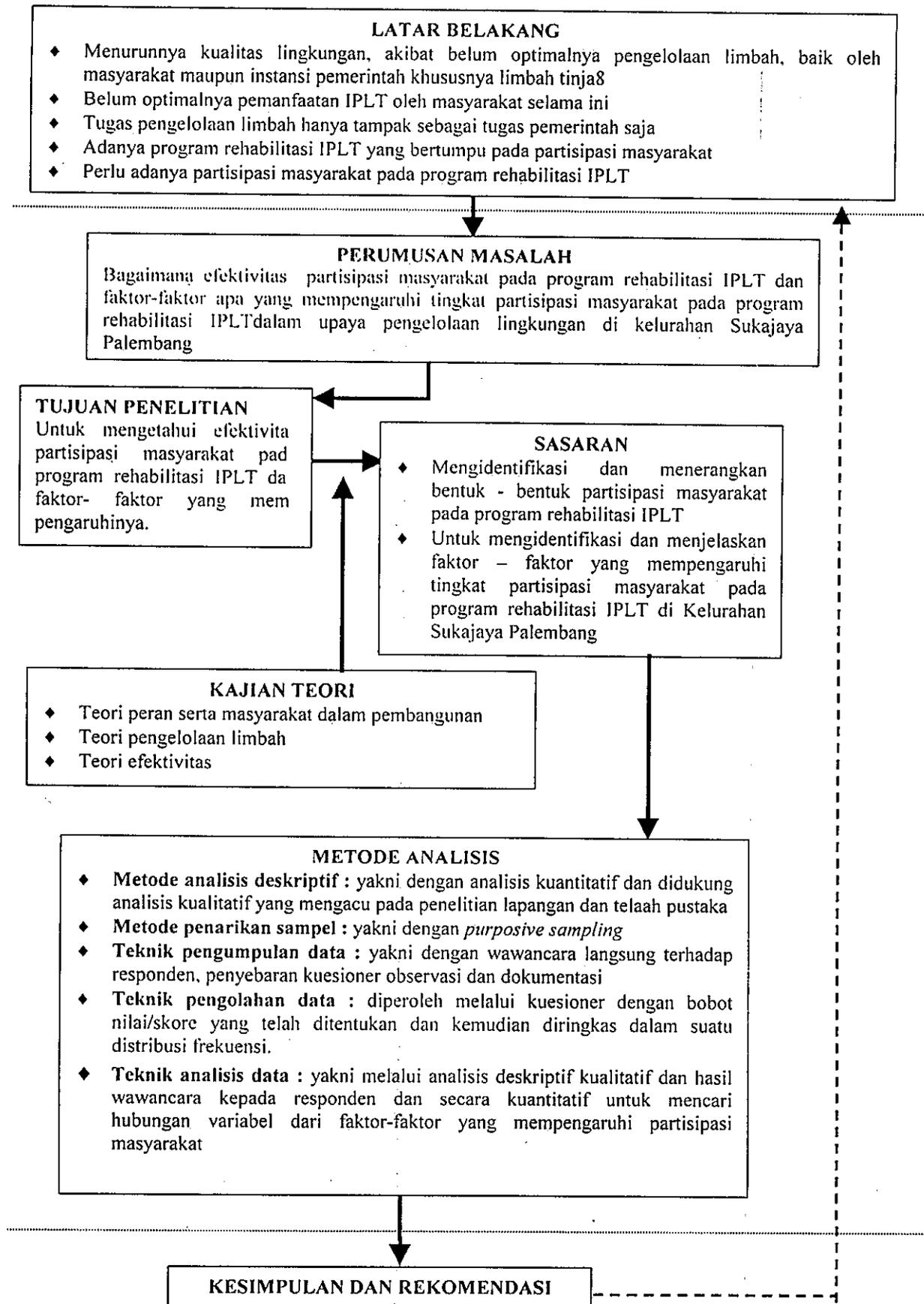
1.6. Kerangka Pemikiran

Menurunnya kualitas lingkungan akibat belum optimalnya pengelolaan limbah, dalam hal ini limbah manusia (tinja), dapat membahayakan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan dimana tugas pengelolaan tersebut hanya tampak sebagai tugas pemerintah saja. Kurangnya partisipasi (partisipasi) masyarakat dalam pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) selama ini serta adanya proyek jangka menengah sektor sanitasi tahun 2001-2006 yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, antara lain proyek rehabilitasi IPLT dalam kerangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hal yang melatar belakangi studi ini. Untuk itu perlu adanya usaha-usaha kegiatan guna mengoptimalkan kegiatan pengelolaan lingkungan yang perlu didukung pula oleh adanya partisipasi masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002 : 7) dengan diterapkannya Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat nyata salah satunya yaitu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Beranjak dari hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas partisipasi masyarakat pada tahap rehabilitasi Unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Sukajaya Palembang serta mengkaji faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada tahap tersebut.

Sebagai landasan untuk mendukung studi ini, diperlukan beberapa teori yang berkaitan dengan tema tersebut, antara lain teori-teori mengenai partisipasi masyarakat, teori efektivitas dan teori mengenai pengelolaan limbah khususnya limbah tinja. Studi ini menggunakan metode penelitian dekriptif dengan analisis kuantitatif, yang diperoleh dari penarikan sampel yang menggunakan *purposive sampling* (pengambilan sampel

bertujuan), wawancara dan survey lapangan terutama untuk memperoleh korelasi antara faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi partisipasi masyarakat dan didukung oleh analisis kualitatif dari hasil wawancara responden.

Adapun Kerangka Pemikiran yang mendasari studi ini, dapat dilihat dalam gambar 1.3.



Gambar 1.3.
KERANGKA PEMIKIRAN

1.7. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi

Metode studi merupakan suatu sistem yang berlaku untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan studi. Di dalam studi ini, digunakan metode analisis kuantitatif dan didukung dengan analisis kualitatif, yang mengacu pada pengumpulan data melalui studi lapangan, observasi partisan dan wawancara. Analisa kuantitatif, diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian diolah untuk mendapatkan data tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan hubungan antara faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Palembang. Sedangkan analisis kualitatif, diperoleh dengan cara menggali informasi secara mendalam dari fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu obyek, disusun dalam suatu rangkaian kalimat dan di analisis guna mendukung analisis kuantitatif.

1.7.1. Pendekatan Studi

Studi ini lebih memfokuskan pada studi lapangan (*field research*), untuk mengetahui permasalahan serta untuk mendapatkan informasi-informasi dan data yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini akan ditunjang penelaahan pustaka (*literature study*), terutama sekali pada awal penyusunan kerangka pemikiran dan teori.

1.7.2. Metode Pelaksanaan Studi

Berdasarkan masalah yang penulis ajukan, maka digunakan penelitian kuantitatif dan didukung data kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mendapatkan tingkat tinggi rendahnya partisipasi masyarakat di wilayah studi dan faktor-faktor yang

diperkirakan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, dimana datanya diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Sedang analisis kualitatif, yaitu mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif analisis melalui data yang dikumpulkan, disusun dijelaskan kemudian dianalisis. Penggunaan penelitian deskriptif ini karena studi ini memfokuskan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data atau masukan dari masyarakat sebagai data primer. Dijelaskan oleh Whitney (1960) dalam Natzir 1988 : 63), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap dan pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data primer langsung dari sumbernya, sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan katagoris dari data itu sendiri (Chadwick, Howard dan Stan, 1991 : 33). Cara penelitian ini dilakukan karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang rumit dan banyak hal yang tidak terungkap lewat data-data statistik, sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya.

Disamping itu, digunakan metode deskriptif, yang diartikan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1983 : 7).

1.7.2.1. Teknik Sampling

Tidak semua anggota masyarakat pada setiap lokasi penelitian yang menjadi wilayah studi menjadi unit pengamatan. Unit pengamatan menurut Rubin dan Babbie (1989 : 66) adalah unit pengumpulan data, yaitu elemen atau kelompok elemen darimana informasi dikumpulkan. Karena populasi yang terlalu banyak, maka digunakan sampling dalam penelitian ini. Dengan dasar bahwa sampel adalah sebagian dari obyek atau individu-individu yang mewakili suatu populasi (Pabundu, 1997 : 29). Selanjutnya menurut Pabundu disebutkan bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan yang jelas tentang batas minimal besarnya sampel yang dapat diambil dan mewakili suatu populasi. Menurut Nasution (2001 : 101) sampel yang besar belum tentu menjamin mutu hasil penelitian, tetapi yang terpenting adalah kokohnya teori-teori yang mendukungnya, desain penelitian, pengolahan data, serta mutu pelaksanaannya, sehingga dapat diambil kesimpulan berupa generalisasi. Pada umumnya untuk peneliti pemula, sampel diambil kira-kira 10 % dari total populasi. Bilamana sampel sebesar 10 % dari total populasi masih dianggap besar (lebih dari 30) maka alternatif yang bisa digunakan adalah mengambil sampel sebanyak 30, dengan pertimbangan ukuran sampel tersebut telah dapat memberikan ragam sampel yang stabil sebagai pendugaan ragam populasi. (Sugiarto, 2001 : 10). Dalam kajian yang lain disebutkan bahwa sampel terkecil dan dapat mewakili distribusi normal adalah 30 (tigapuluh) sampel (Pabundu, 1997 : 33).

Sementara itu Kartono (1986 : 27) mengatakan bahwa sampling adalah aktivitas mengumpulkan sampel. Sampel adalah contoh atau wakil yang dipilih dari suatu populasi yang cukup besar dan bersifat representatif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster sampling* atau sampling berkelompok. Pada sampling ini,

pemilihan dilakukan pada kelompok unit (populasi dibagi dalam kelompok-kelompok) dan memasukkan seluruh unit dalam kelompok terpilih sebagai bagian dari sampel. Selanjutnya Kartono (1996 : 28) mengatakan bahwa agar cluster sampling tersebut dapat mewakili populasinya, *cluster sampling* dapat digabungkan dengan cara pengambilan sampel yang lain, misalnya purposive sampling atau sampling bertujuan. Teknik sampling ini digunakan karena populasi dari obyek penelitian ini sangat heterogen. Disamping itu penggunaan *teknik bertujuan* atau *purposive sampling* ini, karena penelitian kualitatif mendasarkan pada informasi-informasi yang pasti (tetap dan jelas) dan tidak diragukan mengenai ciri-ciri khusus satu populasi, sehingga sampel-sampel yang dipilih dalam teknik sampling ini benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi di lokasi penelitian. Untuk itu diperlukan pula responden yang mengetahui benar tentang permasalahan yang menjadi tema penulisan ini.

1.7.2.2. Jenis Data

Dalam studi ini data diambil dari beberapa sumber, yang terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap beberapa responden yang terpilih menjadi sampel penelitian, dengan berpedoman koesioner yang bersifat tertutup dan terbuka.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Dalam hal ini adalah bagan-bagan, data statistik dan catatan-catatan yang ada.

1.7.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah melalui :

1. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Yakni dengan menggunakan kuesioner yang diajukan kepada seluruh responden, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Artinya jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan. Sedang pertanyaan terbuka untuk memperoleh penjelasan/alasan dari pilihan jawaban. Teknik wawancara ini digunakan dengan alasan untuk mempermudah dan mempercepat serta untuk menghemat tenaga dan waktu dalam mengumpulkan data primer dari responden.

2. Wawancara Mendalam

Adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik ini digunakan secara simulyan dan sebagai cara utama memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi. Dalam pengumpulan data ini, digunakan prinsip *snowball sampling* (bertanya langsung ke responden).

Yang dimulai dengan mencari *key informan* baru dan seterusnya. Teknik ini digunakan dengan alasan untuk mendapatkan data secara mendalam dari responden. Beberapa hal yang belum tercakup dalam daftar pertanyaan dapat digali dengan teknik ini.

3. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan hal-hal yang penting, sehingga diharapkan kan mendapatkan gambaran yang nyata tentang keadaan dan kondisi di

tempat penelitian. Teknik observasi dipergunakan pada lokasi penelitian yaitu di Dusun Kelurahan Sukajaya Palembang, dengan alasan untuk mengetahui potensi yang melekat pada lokasi penelitian tersebut, seperti keadaan atau kondisi masyarakat, perilaku masyarakat, keadaan fisik lapangan dan sebagainya.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau catatan-catatan, monografi atau daftar tabel statistik dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti untuk bahan menganalisis permasalahan, misalnya jumlah penduduk, jumlah RT, RW yang ada di lokasi penelitian, peraturan perundangan, yang dapat diperoleh di dinas terkait.

1.7.2.4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah pengolahan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Dalam proses pengolahan data, jawaban responden dari tiap-tiap pertanyaan akan diberi bobot/nilai yang telah ditentukan. Kemudian dari nilai-nilai yang diperoleh dari setiap pertanyaan guna mengetahui tingkat tinggi rendahnya setiap karakteristik, agar dapat dipakai sebagai data yang mudah dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka penyebaran nilai-nilai tersebut perlu diringkas dalam suatu distribusi frekuensi, yaitu suatu daftar yang membagi data yang ada ke dalam beberapa kelas. Peringkasan ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data dalam 4 (empat) katagori yaitu : sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah.

Untuk mempercepat proses analisis pengolahan data, diperlukan program komputer yaitu dengan menggunakan program/software SPSS (*statistical product and service solutions*), terutama di dalam menentukan tingkat hubungan korelasi antar variabel.

1.7.2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan didukung analisis kualitatif. Dari data kuantitatif yang telah diperoleh berupa *skore* atau nilai sebagai data primer kemudian dianalisis dan disajikan dalam tabulasi, untuk mendapatkan tingkat tinggi rendahnya partisipasi masyarakat. Di dalam studi ini yang akan dikaji adalah tingkat efektivitas partisipasi masyarakat dalam 2 (dua) Aspek keterlibatan masyarakat (partisipasi) pada tahap rehabilitasi IPLT yang meliputi :

- 1). Tahap Perencanaan proyek rehabilitasi IPLT, yang parameternya antara lain :
 - Frekuensi kehadiran dalam pertemuan
 - Keaktifan dalam berdiskusi/mengemukakan usul
 - Bentuk-bentuk usulan
 - Keterlibatan dalam desain bangunan
- 2). Tahap pelaksanaan proyek rehabilitasi IPLT
 - Sumbangan tenaga
 - Sumbangan uang
 - Sumbangan material
 - Masukan dalam perubahan desain.

Adapun katagori tingkat tinggi rendahnya masing-masing aspek kegiatan (aktivitas) diatas ditentukan sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL I.1
KATAGORI TINGGI RENDAHNYA MASING-MASING ASPEK

KATAGORI	TAHAP PERENCANAAN	TAHAP PELAKSANAAN
Sangat Tinggi	16 – 20	16 – 20
Tinggi	12 – 15	12 – 15
Rendah	8 – 11	8 – 11
Sangat Rendah	4 – 7	4 – 7

Besar kecilnya interval masing-masing variabel kegiatan adalah sama, karena kegiatan Perencanaan memiliki 4 (empat) parameter, bila menjawab sangat sering, memiliki nilai 5, bila menjawab sering, memiliki nilai 4, bila menjawab jarang memiliki nilai 2 dan bila menjawab sangat jarang, memiliki nilai 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel I.2 berikut ini.

TABEL I.2
TABEL SKALA LINGKERT UNTUK MASING-MASING JAWABAN

Kategori Jawaban	Skore/Nilai
Sangat Sering	5
Sering	4
Jarang	2
Sangat Jarang	1

Dari perhitungan diatas nilai akumulasi jawaban tertinggi adalah 20 (duapuluh) dan nilai akumulasi jawaban terendah adalah 4 (empat). Kegiatan pelaksanaan juga memiliki 4 (empat) parameter dengan ketentuan nilai sama dengan kegiatan perencanaan,

UPT-PUSTAK-UNDIP

maka akumulasi jawaban tertinggi adalah 20 (duapuluh) dan nilai akumulasi jawaban terendah adalah 4 (empat).

Nilai interval kelas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/N$$

Keterangan :

i = Lebar interval kelas

R = Rentang (jumlah skor tertinggi – skor terendah)

N = Jumlah kelas/kategori (Sudjana, 1996 : 47)

Dari masing-masing ke-2 (dua) aktivitas tersebut kemudian dilanjutkan dengan metode deskriptif kualitatif yang didapat melalui data kuesioner dan dipertegas lagi melalui wawancara responden dan aparat yang berkompeten, sehingga dapat disimpulkan bagaimana tingkat efektivitas partisipasi masyarakat berdasarkan 8 (delapan) tangga peran serta masyarakat dan skala peran serta masyarakat.

Adapun untuk mencari hubungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dilakukan dengan uji *crosstab* (tabulasi silang). Sementara data sekunder dan data dokumentasi, disajikan untuk melengkapi dan memberi gambaran terhadap kondisi obyek penelitian.

Dalam analisis kuantitatif, ditentukan jumlah responden untuk setiap kelompok variabel pengaruh dicatat, karena angkanya diperlukan dalam interpretasi. Untuk memudahkan pembacaan, semua data yang masuk diformulasikan dalam bentuk kode angka-angka sebagai penyederhanaan, sehingga semua angka dalam data entri memiliki

makna sesuai klasifikasi atau pengkatagorian dalam daftar pertanyaan. Analisis kuantitatif, meliputi analisis korelasi variabel untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara parameter satu dengan parameter lainnya. Dalam studi ini analisis korelasi akan dilakukan dengan kajian bivariat (menggunakan dua variabel) dengan teknik tabulasi silang.

Untuk mengamati ada tidaknya hubungan antara dua variabel (independent dan dependent), dianalisis dengan berdasarkan perbandingan *chi square* (x^2) hasil uji (*chi square* hitung) dengan *chi square* (x^2) tabel. Dikatakan ada hubungan bilamana nilai hitung (x^2) lebih besar dibanding nilai tabel (x^2), begitu pula sebaliknya. Dilihat dari probalitasnya

hipotesis yang dipergunakan, bila taraf signifikansi *chi square* hitung > taraf signifikansi (0,05), maka inferensi yang diambil adalah menerima H_0 dan bila taraf signifikansi *chi square* hitung < taraf signifikansi (0,05), maka H_0 ditolak.

Adapun Hipotesis yang dipergunakan adalah :

H_0 : Tidak ada hubungan antara variabel X (independent) dengan variabel Y (dependent)

H_1 : Ada hubungan antara variabel X (independent) dengan variabel Y (dependent)

Variabel Independent meliputi ke-5 (lima) faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi IPLT yang terdiri dari : Jenis Kelamin/Sex, Usia, Mata Pencaharian, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pengetahuan/pendidikan. Sedangkan variabel dependent adalah meliputi parameter-parameter yang diukur pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi IPLT.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang menguraikan permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini, mulai dari latar belakang masalah sampai kebutuhan biaya penelitian. Uraian masing-masing bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Bab I, berisi latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup substansial/materi dan ruang lingkup spatial/wilayah, kerangka pemikiran pendekatan dan metode pelaksanaan studi dan sistematika penulisan.

Bab II, adalah Kajian Teori, pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam studi ini, sehingga dari permasalahan yang diangkat sebagian dapat terjawab walaupun masih bersifat teoritis.

Bab III, merupakan Deskripsi Wilayah Studi, yang termasuk didalamnya Gambaran Umum Wilayah studi dan Kondisi Fisik Wilayah Studi dan penduduk dan karakteristik masyarakat di wilayah studi

Bab IV, Analisis dan Pembahasan, yang merupakan hasil kajian yang didapatkan dari data-data baik primer, sekunder dan hasil observasi di lapangan, yang termasuk di dalamnya studi partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi IPLT, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pada tahap rehabilitasi IPLT di wilayah studi serta kajian tingkat efektivitas partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi IPLT di wilayah studi.

Bab V, Kesimpulan dan Rekomendasi

Daftar Pustaka

Lembar Kuisisioner, yang merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden

Lampiran, Berisi gambar-gambar IPLT dan lokasi di sekitar IPLT dan hasil perhitungan program SPSS yang menggunakan analisis tabulasi silang (*crosstab*).

BAB II

KAJIAN TEORI PARTISIPASI DAN EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT

Bab ini berisi kajian teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis efektivitas partisipasi serta masyarakat dalam pengelolaan limbah perkotaan khususnya limbah tinja. Kajian teori diperlukan, karena merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami, yaitu rangkaian logis dari suatu proposisi atau lebih (Singarimbun & Efendi, 1995 : 13).

Dari pendapat tersebut, teori merupakan pola pikir yang sistematis, yang dapat menjelaskan hubungan dua fenomena atau lebih. Dengan demikian, maka teori dapat dipergunakan untuk meramalkan akibat yang akan timbul bila suatu gejala terjadi, demikian pula dapat dipergunakan untuk mencari sebab atas suatu akibat yang terjadi. Dengan kata lain, bahwa teori dapat menjadi landasan pijak untuk memecahkan suatu masalah.

Dalam bab ini, kajian teori akan menyangkut pengertian partisipasi masyarakat, kegunaan partisipasi masyarakat, tipe dan bentuk partisipasi, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, pengertian efektivitas dan pengelolaan limbah perkotaan khususnya limbah tinja (*ekskreta*).

2.1. Partisipasi Masyarakat

2.1.1. Pengertian Partisipasi

Adanya berbagai permasalahan di dalam pembangunan kota-kota di Indonesia, khususnya kota-kota menengah dan kota besar, terutama diakibatkan kurang dilibatkannya masyarakat di dalam proses pembangunan kota-kota yang dimaksud.

Pembangunan yang dilaksanakan selama orde baru merupakan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dirancang di tingkat atas dengan menggunakan pola *top down*, hal ini seringkali kurang sesuai dengan kondisi ataupun keinginan dari masyarakat dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Untuk itu perlu partisipasi ataupun pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Terbitan Balai Pustaka Peran Serta padanan katanya berarti *Partisipasi*. Sedangkan menurut terjemahan *Webster Dictionary* Partisipasi/peran serta berarti tindakan pengambilan sebagian dari suatu kegiatan atau program yang mempunyai hubungan dengan pihak lain dan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tertentu serta berkaitan dengan pengambilan keuntungan (manfaat) diantara pihak-pihak yang mengambil bagian.

Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan operasional program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan. (Wibisono, 1989: 41).

Partisipasi menurut rumusan *United Nations Center For Human Settlements* (UNCHS) sebagai Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus pemukiman, partisipasi adalah sebagai berikut :

" Voluntary involvement of people in making and the activities undertaken by low income household with or without outside assistance to improve their living condition "
(UNCHS, 1991).

Rumusan UNCHS menekankan pada pelibatan aktif/tanpa disuruh untuk mengambil dan melaksanakan keputusan langsung menyangkut kehidupan mereka.

Dalam hubungannya dengan pembangunan, menurut PBB dalam Slamet (1993 : 3), memberi definisi partisipasi sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkat-tingkatan yang berbeda (a) di dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut ; (b) pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela ; dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek.

Sedangkan arti partisipasi pada pandangan Ivan D. Illich dalam Goulet (1999 : 12) yang menganjurkan deprofesionalisasi dalam semua bidang kehidupan persekolahan, perawatan kesehatan, transportasi, perencanaan yang maksudnya untuk membuat “ rakyat biasa “ bertanggung jawab atas kepentingan dan kesejahteraannya sendiri. Paulo Freire dalam Goulet (1990 : 13) berpendapat betapa pentingnya partisipasi, hal ini dapat dilihat pada keotentikan pembangunan yakni apakah rakyat yang sebelumnya diperlukan sebagai obyek, yang hanya diharuskan tahu dan melaksanakan, sekarang dapat secara aktif dan bertindak, sehingga menjadi subyek tujuan hidup kemasyarakatannya sendiri. Jikalau rakyat dimampukan berpartisipasi sehingga menjadi subyek aktif yang sadar dan bertindak, mereka akan merancang sejarah manusiawinya dalam arti yang sebenarnya dan melibatkan diri dalam proses pembangunan.

Wolf dalam Goulit (1990 : 13) memberi definisi partisipasi sebagai usaha-usaha terorganisasi meningkatkan peranan pengendalian atas sumber-sumber daya dan lembaga-lembaga regulatif dalam satuan masyarakat tertentu, bagi kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang sampai sekarang tidak diikutsertakan dalam pengendalian. Definisi

ini mempunyai kegunaan yang sederhana dan praktis sebagai batu loncatan dari mana manfaat – manfaat dan batas-batas partisipasi dalam pembangunan dapat dikaji.

2.1.2. Kegunaan Partisipasi Masyarakat

Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Canter dalam Santosa, 1990 : 4). Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Partisipasi haruslah terbuka untuk umum, partisipasi akan mempengaruhi kredibilitas (*accountability*) badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Yang pada akhirnya akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara atas kegiatan yang dilakukan (Santosa, 1990 : 4).

Menurut Prof. Koesnadi hardjosoemantri dalam Santosa (1990, 4 : 5) bahwa selain memberikan informasi yang berharga kepada pengambil keputusan, partisipasi masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Selanjutnya, partisipasi akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu

keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir.

2.1.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dewasa ini, telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya pembangunan tersebut hanya mengandalkan kemajuan fisik dan ekonomi saja. Pembangunan seharusnya juga menyentuh sisi lain kehidupan manusia selain pembangunan fisik dan ekonomi, yaitu pembangunan sosial politik masyarakat. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang disertai dengan pendayagunaan sumber-sumber daya yang ada di dalam masyarakat umumnya telah ada sejak masyarakat itu ada (Slamet, 1993 : 2).

Pembangunan masyarakat sebagai suatu gerakan, lebih menonjol di negara-negara yang sedang berkembang seperti misalnya di negara-negara kawasan benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Namun demikian pembangunan masyarakat sebagai suatu gerakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kehidupan mereka bukannya tidak ada. Di Amerika Serikat misalnya, dalam rangka membangun masyarakat melalui masyarakat masyarakat itu sendiri telah dikenal dengan gerakan empat H, yaitu suatu gerakan bermaksud untuk menyadarkan bahwa manusia itu memiliki 4 (empat) H (*Hand, Head, Heart, Hearer*). Artinya keempat organ tubuh itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi mencapai keinginan sehingga terwujudnya suatu kesejahteraan (Slamet, 1993 : 3).

Menurut Conyers (1994 : 154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat sebagai alat guna

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, lalu ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep '*man-centred development*', yaitu suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia, yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar alat pembangunan itu sendiri. Karena dalam suatu proses pembangunan akan jauh lebih baik, bila sejak awal sudah mengikutsertakan masyarakat pemakai hasil pembangunan itu (Yudohusodo, 1991 : 89). Dengan demikian hasilnya akan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Ickis dalam Yulianti (2000 : 23) usaha membangun masyarakat yang dilakukan secara sistemis dan terencana, memiliki strategi yang menekankan pada kemandirian, yang disebut strategi responsif. Strategi ini, merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan (*welfare strategy*), yaitu adanya keyakinan bahwa orang-orang yang hidup akan secara langsung dipengaruhi oleh usaha-usaha pembangunan untuk mengetahui dengan pasti apa kebutuhan dan kekurangan mereka dan tahu cara berbuat demi pemenuhan kebutuhan dan kekurangan itu. Strategi selanjutnya menurut Ickis dalam Yulianti (2000 : 23) ialah, strategi yang menekankan pemerkuatan masyarakat sebagai suatu kesatuan atau sebagai "*integrated*", yang mengacu pada penyiapan-penyiapan struktural dan tidak mencerminkan persepsi dan asumsi kritis yang mendasarinya.

Pembangunan masyarakat yang demikian ini bersifat holistik, karena pendekatan ini mencerminkan gagasan yang bersifat komprehensif tentang kemiskinan sebagai suatu produk dari berbagai faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat diselesaikan secara terpisah-pisah dan melalui teknologi yang terspesialisasi serta tidak dapat diukur dengan kumpulan indikator statistik.

Namun lepas dari strategi mana yang dianut, setiap usaha pembangunan harus selalu memperhatikan sifat dan arah dari perubahan sosial yang terjadi dari pembangunan itu sendiri. Dampak bagi masyarakat adalah, munculnya kesenjangan di dalam masyarakat dan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dampak lain yang dirasakan adanya kecemburuan sosial yang berasal dari perhatian yang berlebih-lebihan pada golongan tertentu di masyarakat. Kecemburuan tersebut dirasakan bila proyek-proyek pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik, sangat menguntungkan sekelompok orang atau orang tertentu saja. Untuk itu, pembangunan yang merata di semua aspek kehidupan dengan didasarkan atas kebutuhan dan keinginan masyarakat, dewasa ini sangat diperlukan.

2.1.4. Skala Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pemahaman dan evaluasi yang tepat mengenai partisipasi masyarakat, hanya dapat diperoleh jika partisipasi masyarakat dipandang dari latar belakang filosofis yang mencakup teori-teori dalam perencanaan, organisasi sosial, proses politik termasuk di dalamnya pembentukan keputusan, komunikasi, manajemen perkotaan dan ideologi-ideologi dalam masyarakat (Oosthuizen dalam Oetomo, 1994 : 23). Untuk itu, partisipasi berkaitan erat dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dimana partisipasi

masyarakat berlangsung. Dengan demikian, tentunya dari satu kelompok dengan kelompok masyarakat lain, akan mempunyai perbedaan dalam menilai partisipasi masyarakat.

Menurut Moughtin (2001 : 68), sebagai salah satu cara untuk memahami dan mengevaluasi suatu partisipasi masyarakat adalah dengan melihat Skala Analisa Partisipasi Masyarakat (*Analytical Scale of Participation*), seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini.

TABEL II.1
SKALA ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT

TEKNIK PARTISIPASI	TINGKAT PARTISIPASI		PENGAMBILAN KEPUTUSAN		UNIT SPASIAL	BENTUK PERENCANAAN
Administrasi masyarakat	Kontrol Masyarakat	Derajat Kekuasaan masyarakat	Anarki		Ruangan	Bukan rencana
Kemandirian Pembangunan	Pelimpahan Kekuasaan		Demokrasi partisipatif	pemerintahan	Rumah	
Perencanaan dan Perancangan oleh masyarakat	Kemitraan				Jalan	
Manifesti politik	penentraman	Derajat penghargaan	Demokrasi perwakilan	demokrasi	Lingkungan	Rencana Inkremental
Pertemuan masyarakat	konsultasi				kawasan	
Penyelidikan keadaan masyarakat					informasi	Kota kecil
Permohonan Perencanaan	Survei perencanaan					terapi
Pameran/pertunjukan	Studi pengguna	manipulasi	wilayah	Rencana Induk		
Pemberitaan pers			negara			
Studi antropologi						Bukan Rancangan Orientasi pada sumber-Geometris-formal- Informal-Rancangan khusus

Sumber : Moughtin. 1992

Skala ini adalah gabungan dari beberapa skala pengukuran yang mengindikasikan cara-cara menganalisa proses partisipasi. Skala-skala pengukuran tersebut adalah :

1. Teknik partisipasi : cara-cara atau bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan, terdiri dari 12 tangga, yang terendah adalah studi antropologis dan yang

tertinggi adalah administrasi masyarakat. Semakin tinggi dianggap semakin aktif tingkat partisipasinya.

2. Tingkat partisipasi : yaitu tingkat partisipasi dalam Tangga Partisipasi dari Sherry Arnstein, yang didasari pemikiran bahwa “ *Participation can have different meaning for different people* “. Disusun untuk mengevaluasi keefektifan mekanisme partisipasi secara murni dan mudah, sehingga didapat kesimpulan seberapa besar kekuasaan yang telah diberikan kepada masyarakat dalam berpartisipasi ?
3. Sistem Politik/Sistem Pengambilan Keputusan : yang ditampilkan adalah dari tingkat anarki, berbagai bentuk demokratisasi, sampai pemerintah yang totaliter atau diktator. Dari sudut pandang partisipasi, sistem politik yang sesuai berada pada tingkat pertengahan, dimana meningkatnya demokrasi adalah sebagai salah satu pentingnya partisipasi masyarakat.
4. Unit Spatial (keruangan) : semakin menurun/rendah tingkatannya semakin banyak jumlah individu yang tercakup, berarti semakin beragam pula keinginan masyarakat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
5. Bentuk perencanaan : suatu bentuk perencanaan yang didapat mulai dari perencanaan non-formal, non plan, tipe keputusan *ad-hoc*, sampai pada metode-metode perencanaan yang kaku, *master plan* (rencana induk).

Partisipasi masyarakat yang baik dan cukup berarti, menurut Moughtin (1992 : 73), dapat dilihat dalam lingkup-lingkup tertentu saja (daerah yang diarsir dalam skala analisis partisipasi masyarakat). Sistem pemerintahan yang dapat memungkinkan tersalurkannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sistem pemerintahan demokrasi, khususnya yang menganut demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif adalah tipe demokrasi yang menuntut adanya partisipasi masyarakat, tidak saja lewat wakil-

wakilnya yang terpilih, tetapi lewat keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan (Kaunda dalam Conyers, 1991 : 155).

Dalam sistem pemerintahan seperti ini, tingkat partisipasi masyarakatnya adalah tingkatan dimana kekuatan/kekuasaan warga negara/masyarakat terlihat, yang terdiri dari tiga tingkatan partisipasi, yaitu (dari tinggi ke rendah) kontrol masyarakat, pelimpahan kekuasaan dan kemitraan. Bagi Arnstein (1995 : 53) partisipasi yang berarti, adalah kekuasaan masyarakat, yaitu strategi dimana masyarakat yang tidak mampu dapat membawa reformasi sosial, sehingga mereka dapat berbagi manfaat dengan masyarakat yang mampu.

Melalui tingkat partisipasi seperti tersebut diatas, teknik partisipasi yang dapat dilakukan adalah (dari tinggi ke rendah) administrasi masyarakat, kemandirian dan perencanaan serta perancangan yang dilakukan masyarakat. Sedang unit spatial/keruangan dimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat terlihat adalah (dari unit yang kecil ke unit yang lebih besar) rumah, jalan dan lingkungan. Dan yang terakhir, bentuk perencanaan yang dapat mengakomodasikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah perancangan yang langsung dilaksanakan (rencana tindak) dan perancangan perbagian yang direncanakan (rencana inkremental).

Dari ke lima skala tersebut, skala yang memegang posisi sangat menentukan bagi skala lainnya adalah, skala tingkat partisipasi. Skala yang merupakan tangga partisipasi masyarakat dari Arnstein ini, dapat digunakan untuk menganalisis besarnya kekuasaan yang telah diberikan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan konteks *top-down planning* dan *bottom-up planning*. Skala ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana peran *top-down planning* dan *bottom-up planning* dalam proses pembangunan.

2.1.5. Tipe-tipe Partisipasi

Duseldorp dalam Slamet (1993 : 10-21), mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi yaitu :

1. Penggolongan berdasarkan derajat kesukarelaan

Bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, terdiri dari dua bentuk, yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi menjadi partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan, terjadi bila seorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh orang atau lembaga lain. Sedang partisipasi terbujuk, bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain.

Adapun partisipasi terpaksa terjadi karena terpaksa oleh hukum dan terpaksa karena keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan hukum dalam suatu kegiatan.

2. Penggolongan berdasarkan pada cara keterlibatan

Penggolongan ini dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi bila orang menampilkan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi seperti misalnya, mengambil peran dalam pertemuan, diskusi, menyumbangkan tenaga dan sebagainya. Partisipasi tidak langsung terjadi bila seorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya dalam pengambilan keputusan seperti halnya di senat, DPR, dewan-dewan koperasi dan sebagainya. Namun demikian wakil-wakil tersebut, diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan serta melindungi

hak-hak yang diwakili, harapannya adalah agar para wakil itu, dapat mengambil bagian di dalam proses pembuatan keputusan pada tingkatan yang lebih tinggi.

3. Penggolongan berdasarkan pada keterlibatan dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan.

Ada enam langkah, yaitu perumusan tujuan, penelitian, persiapan rencana, penerimaan rencana, pelaksanaan dan penilaian. Disebut partisipasi lengkap apabila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam tahap tersebut. Sedangkan disebut partisipasi sebagian, bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat di dalam seluruh tahapan tersebut.

4. Penggolongan berdasarkan pada tingkat organisasi

Penggolongan ini dibedakan antara partisipasi yang terorganisasi dan partisipasi yang tidak terorganisasi. Partisipasi terorganisasi terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau dalam proses penyiapan. Sedang partisipasi tidak terorganisasi, terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo kadang-kadang saja yang umumnya karena keadaan memaksa. Partisipasi tidak terorganisasi ini akan tumbuh menjadi terorganisasi bila kegiatan yang dilakukan itu berulang-ulang, sehingga demi kelancaran pelaksanaannya diperlukan pengorganisasian.

5. Penggolongan berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan

Partisipasi intensif terjadi bila didalamnya terdapat aktifitas partisipatif yang tinggi. Sedang partisipasi ekstensif bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan memerlukan interval waktu yang panjang.

6. Penggolongan berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan

Digolongkan menjadi partisipasi tak terbatas, yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawasi oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang

membutuhkan partisipasi anggota komunitas. Kedua adalah partisipasi terbatas, yang terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik administrasi dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.

7. Penggolongan berdasarkan pada efektivitas

Secara tingkat efektivitas, partisipasi dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi efektif dan partisipasi tidak efektif. Partisipasi efektif yaitu kegiatan-kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi. Partisipasi tidak efektif, terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktivitas partisipatif yang dicanangkan terwujud.

8. Penggolongan berdasarkan pada siapa yang terlibat

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dibedakan sebagai berikut :

- a. Anggota masyarakat setempat :
 - Penduduk setempat
 - Pemimpin setempat
- b. Pegawai Pemerintah
 - Penduduk dalam masyarakat
 - Bukan penduduk
- c. Orang-orang luar
 - Penduduk dalam masyarakat
 - Bukan penduduk
- d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

9. Penggolongan berdasarkan gaya partisipasi

Dibedakan menjadi 3 (tiga) model praktek organisasi masyarakat, yaitu :

- a. Pembangunan lokalitas

Memiliki maksud melibatkan orang-orang di dalam pembangunan mereka sendiri dan dengan cara ini menumbuhkan energi sosial yang dapat mengarah pada kegiatan menolong diri sendiri.

b. Perencanaan sosial

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan sosial, memiliki tujuan utama untuk mencocokkan terhadap kebutuhan yang dirasakan dan membuat program lebih efektif.

c. Aksi sosial

Tujuan utama tipe ini adalah memindahkan hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber.

2.1.6. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan operasi pembangunan tersebut (Slamet, 1993 : 23). Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan suatu pelibatan masyarakat yang paling tinggi. Karena dalam proses perencanaan masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan. Yang dimaksud membuat keputusan disini ialah menunjuk secara tidak langsung seperangkat aktivitas tingkah laku yang lebih luas, bukannya semata-mata hanya membuat pilihan diantara berbagai alternatif.

Dalam hal partisipatif, perencanaan pembangunan mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target, merumuskan program-program, menilai program apakah program itu dapat mewujudkan tujuan, merencanakan dan menilai biaya dan sumber-sumber biayanya. Bentuk partisipasi dalam tahap perencanaan ini, dapat diikuti langsung oleh warga masyarakat maupun melalui lembaga yang ada seperti LKMD, RW maupun RT.

LKMD merupakan lembaga masyarakat di Kelurahan/Desa yang merupakan suatu wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang memadukan berbagai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan peran serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan. LKMD bertujuan untuk membantu pemerintah Kelurahan/desa, dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

Adapun Rukun Warga dan Rukun Tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan (pasal I Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1983).

Selanjutnya menurut Slamet (1993 : 25), bahwa partisipasi dalam pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program-program yang telah digariskan, di dalam kegiatan-kegiatan fisik. Dengan demikian, pengukurannya adalah sejauh mana masyarakat telah memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan lembaga yang bersangkutan. Sumbangan tersebut dapat berwujud uang, tenaga dan dapat pula berwujud barang. Pada umumnya yang menyumbang uang adalah golongan penduduk yang tergolong kaya. Sumbangan barang biasanya tidak terbatas pada kelas sosial tertentu tetapi tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Sedang mereka yang menyumbang tenaga biasanya berasal dari masyarakat ekonomi lemah. Meskipun

demikian, tidak tertutup kemungkinan masyarakat dapat menyumbang ketiganya dalam hal ini akan berbeda-beda pada tiap-tiap daerah tergantung pada karakteristik masyarakatnya.

Guna memahami tahap-tahap partisipasi dikemukakan oleh Ndraha (1990 : 103) menyetengahkan 6 tahap partisipasi yaitu : 1). Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain, 2). Partisipasi dalam menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik menerima maupun menolak, 3). Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan, 4). Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, 5). Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan dan 6). Partisipasi dalam mengevaluasi pembangunan sejauh mana kesesuaian dengan rencana. Lebih ringkas pendapat tersebut dikemukakan oleh Ericson dalam Slamet (1993 : 89) mengemukakan 3 (tiga) tingkat partisipasi yaitu : 1). Partisipasi dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*), 2). Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*), 3). Partisipasi dalam tahap operasional. Berkaitan dengan program proyek rehabilitasi IPLT maka perlu dikaji bagaimana partisipasi masyarakat pada tahapan program rehabilitasi IPLT tersebut. Pengukuran yang dapat dilakukan pada tahap rehabilitasi disimpulkan sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan proyek rehabilitasi IPLT

Tahap perencanaan merupakan suatu pelibatan yang paling tinggi di dari masyarakat, karena melalui perencanaan, masyarakat dapat berperan serta dalam menentukan tujuan, merumuskan program, biaya, sumber biaya dan sebagainya sesuai dengan keinginan mereka.

Sedangkan tolok ukur/parameter partisipasi masyarakat dalam batas-batas kegiatan tersebut diatas meliputi :

- Frekuensi kehadiran dalam pertemuan

- Keaktifan dalam berdiskusi/mengemukakan usul
- Bentuk-bentuk usulan
- Keterlibatan dalam desain bangunan.

b. Tahap Pelaksanaan proyek rehabilitasi IPLT

Pengukurannya bertitik pangkal pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas riil dari program yang telah digariskan. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek.

Parameter-parameter yang dapat dilihat dalam tahapan ini adalah :

- Sumbangan tenaga
- Sumbangan uang
- Sumbangan material
- Masukan dalam perubahan desain.

2.1.7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, maka faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian (Slamet 1993 : 97).

1. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno (1972 : 130), mengatakan bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak

istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam berpartisipasi.

2. Usia

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atau dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno, 1992 : 136). Dalam hal ini, golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.

3. Tingkat Pengetahuan

Demikian halnya dengan tingkat pengetahuan. Litwin (1986 : 42) mengatakan bahwa, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah, tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Baross dalam Suparlan (1993 : 122) menyatakan bahwa dalam proyek-proyek pembangunan, penduduk yang lebih berada kebanyakan membayar pengeluaran

tunai dan jarang melakukan kegiatan fisik sendiri. Sementara penduduk miskin melakukan banyak pekerjaan, namun tidak memberi kontribusi uang.

5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian ini akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya. Budihardjo (1991 : 113) menyatakan bahwa banyak warga yang telah disibukan oleh kegiatan sehari-hari, kurang tertarik untuk mengikuti pertemuan, diskusi atau seminar.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah, kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi yang akan dipengaruhi oleh tingkat interaksi dan komunikasi yang terjadi. Karena interaksi dan komunikasi yang terjadi. Karena interaksi dan komunikasi merupakan dasar dari proses sosial pada sebuah kelompok.

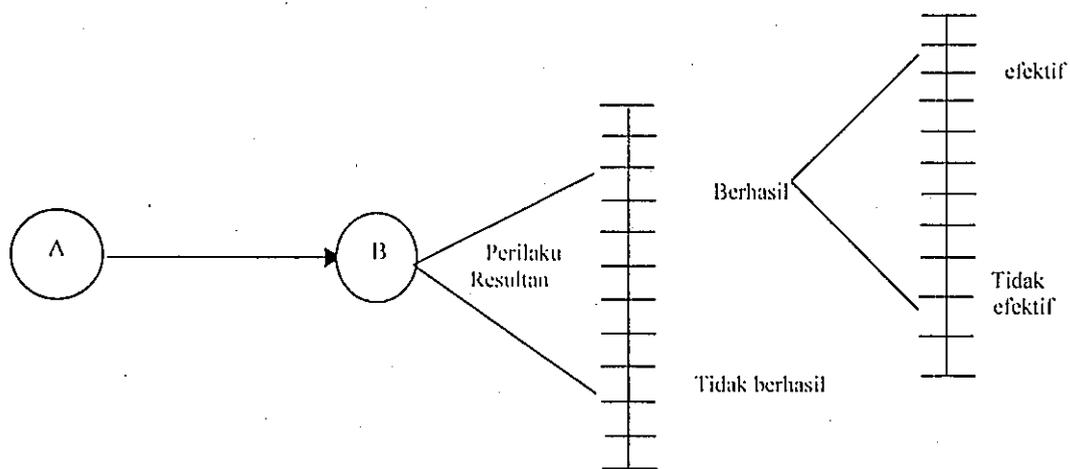
2.2. Efektivitas Partisipasi Masyarakat

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Pengertian Efektivitas dari berbagai bidang keahlian, sangat beragam dan tergantung pada konteks apa efektivitas tersebut digunakan. Menurut Drucker (1978 : 44), efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar, demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula. Sementara itu menurut Barnard dalam Gybson (1996 : 56), efektivitas adalah

pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas.

Menurut Hersey & Blanchard (1986 : 115), efektivitas dalam konteks manajemen adalah tercapainya suatu tujuan yang konsisten dilakukan oleh seseorang atau kelompok pada tingkatan yang lebih bawah. Tetapi perlu diingat bahwa efektivitas juga tampak seperti kontinum yang dapat beranjak dari sangat efektif, sampai dengan sangat tidak efektif. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : Hersey & Blanchard, 1986

GAMBAR 2.1.
BAGAN PROSES KEPEMIMPINAN

Menurut bagan tersebut diatas, apabila upaya kepemimpinan A mengarah pada tanggapan yang berhasil, dan bawahannya (B) melakukan pekerjaan itu, karena ingin melakukannya dan merasa ada hasil yang diperolehnya dengan konsisten, maka tujuan dari semua itu dikatakan berhasil dan efektif.

Kaitannya dengan partisipasi, Dusseldorp dalam Slamet (1993 : 31) mengemukakan bahwa partisipasi yang efektif yaitu kegiatan-kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi.

Partisipasi tidak efektif, terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktivitas partisipatif yang dicanangkan terwujud.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka pengertian efektivitas partisipasi atau partisipasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

efektivitas partisipasi merupakan suatu seperangkat aktivitas partisipasi untuk mencapai tujuan, dengan mempergunakan semaksimal mungkin sumber-sumber daya yang ada.

Dalam hal ini, aktivitas partisipasi tersebut berupa metode atau cara-cara seseorang dalam berpartisipasi.

2.2.2. Tolok Ukur Efektivitas Partisipasi

Untuk mengukur tingkat keefektifan suatu kelompok, menurut Moughtin (1992 : 78) dapat dilakukan dengan skala analisis partisipasi masyarakat sebagaimana telah dibahas di sub bab 2.1.3., yaitu merupakan gabungan dari beberapa skala pengukuran yang mengindikasikan cara-cara menganalisis partisipasi masyarakat. Skala pengukuran tersebut adalah teknik partisipasi, tingkat partisipasi, sistem politik, unit spasial dan bentuk perencanaan. Dari kelima pengukuran tersebut, tingkat peran yang diadopsi dari pendapat Arstein, merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat.

Menurut Sherry Arnstein (1969) yang dikutip Hadi (1999 : 55), menguraikan perbedaan partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan. Melalui artikelnya yang berjudul “ *Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation* ” ia menerangkan perbedaan antara partisipasi yang *sumir* dengan *real*

partisipasi yang mempengaruhi hasil dalam perencanaan. Bila digambarkan tampak sebagai berikut :

8	<i>Citizen control</i>		<i>Degree of citizen power</i>
7	<i>Delegated power</i>		
6	<i>Partnership</i>		
5	<i>Placation</i>		<i>Degree of Tokenism</i>
4	<i>Consultation</i>		
3	<i>Information</i>		<i>Non participation</i>
2	<i>Therapy</i>		
1	<i>Manipulation</i>		

Sumber : Sherry Arstein, 1995

GAMBAR 2.2.
EIGHT RUNGS ON THE LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION

Pada tingkat yang paling bawah (1) manipulasi dan (2) perbaikan, disimpulkan sebagai tingkat yang bukan partisipasi atau *non participation* . Tujuan dari model ini, bukan untuk memberi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi untuk mengemampukan pemegang kekuasaan guna mendidik dan mengobati para peserta dalam partisipasi. Tingkat (3) informasi dan (4) konsultasi disebut sebagai tingkatan Tokenisme atau sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara. Namun demikian suara atau pendapat mereka belum tentu menjadi bahan bagi pengambilan keputusan. Bentuk yang ke (5) penentrangan dipandang sebagai tokenisme pada tingkat yang lebih tinggi dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan *advice* tetapi kekuasaan untuk pengambilan keputusan tetap ditangan pemrakarsa kegiatan. Pada tingkat ke (6) kerjasama, masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam *trade off* dengan para pemegang kekuasaan. Pada tingkat (7) penderahan kekuatan dan (8) kontrol masyarakat, masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

Secara lebih jelas, tipologi yang digambarkan diatas dapat dikategorikan seperti dalam tabel dibawah ini, yaitu :

TABEL II.2
TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT

JENJANG PARTISIPASI	PENGGOLONGAN	KETERANGAN
1. Manipulasi atau penyalahgunaan 2. Perbaikan	Ketidakterlibatan atau tidak ikut serta (<i>non participation</i>)	Tujuannya ialah tidak mungkin membantu masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan atau melaksanakan program-program tersebut, tetapi dapat membantu para pejabat untuk mendidik dan mengarahkan para partisan.
3. Pemberitahuan 4. Konsultasi 5. Penentraman	Tingkat penghargaan atau formalitas (<i>degree of tokenism</i>)	Anggota masyarakat boleh dan harus didengar, akan tetapi mereka tidak punya kekuatan, sehingga pandangan mereka kurang didengar oleh para pejabat.
6. Kerjasama 7. Pengerahan kekuatan 8. Kontrol masyarakat	Tingkat kekuatan masyarakat (<i>degree of citizen power</i>)	Tujuannya ialah membantu masyarakat untuk mampu bernegosiasi dan berhubungan dengan para pejabat atau mengambil keputusan

Sumber : Terjemahan dari Arnstein, dalam Jay M. Stein, 1995

Pengamatan suatu proses pembangunan dengan menggunakan tipologi ini, dapat memberikan kejelasan tentang seberapa jauh pengikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan secara keseluruhan, yang selanjutnya dapat menjadi sumber legitimasi alternatif usulan, karena di dalam masyarakat, tentunya akan mempunyai penilaian yang berbeda tentang partisipasi masyarakat yang tepat dilaksanakan di lingkungan mereka.

Ukuran efektivitas partisipasi masyarakat yang didasarkan pada pengertian partisipasi sebagai pengambilalihan sebagian kegiatan, menyebabkan ukuran yang ada merupakan ukuran kualitatif. Ukuran dari sifat partisipasi hanya dapat digambarkan melalui tipologi partisipasi yang menunjukkan perbedaan derajat dan kualitas keterlibatan masyarakat pada kegiatan tertentu.

Tipologi yang digambarkan oleh Arnstein (1995 : 77) telah memberi kejelasan, bahwa tingkat partisipasi dalam proses pembangunan akan efektif, bila telah berada pada jenjang *degree of citizen power*, yaitu masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

2.3. Pengelolaan Limbah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 16 ayat (1) Pengelolaan Limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Sedang menurut Metcalf dan Eddy (1981 : 112), bahwa pengelolaan limbah meliputi kegiatan pengumpulan, penyaluran dan pembuangan limbah. Dari pengertian diatas, pengelolaan limbah identik dengan pengertian manajemen pada umumnya, dimana menurut Drucker (1978 : 21), manajemen adalah fungsi obyektif dan harus didasarkan pada tanggung jawab untuk karya.

Dari uraian tersebut, pengelolaan adalah kemampuan mengelola tenaga kerja, dana, organisasi dan peralatan untuk mendapatkan kondisi lingkungan yang sehat. Kemampuan mengelola adalah karya yang obyektif yang dapat dipertanggung jawabkan secara nyata, ini berarti bahwa meskipun limbah merupakan barang sisa yang tidak berguna, namun apabila tidak dikelola sedemikian rupa, dampaknya akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kehidupan.

Limbah domestik mencakup seluruh limbah rumah tangga yang dibuang ke dalam badan penerima, termasuk limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat perkotaan termasuk sampah dan limbah tinja yang terus meningkat volumenya sejalan dengan jumlah penduduk dan penghuni kota.

Secara umum, sanitasi kota mencakup beberapa aspek antara lain penyediaan air bersih, penanganan air limbah, pembuangan air hujan dan penanganan limbah padat (sampah). Sedang secara khusus sanitasi kota ialah, usaha penanganan air limbah domestik, baik air limbah yang berupa bekas atau air buangan dari kegiatan sehari-hari, seperti mandi dan cuci serta kegiatan domestik lainnya seperti penanganan limbah manusia.

Limbah domestik atau limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga atau kegiatan lain yang sejenis dengan ciri limbah antara lain : (a) dihasilkan oleh kegiatan non industri, (b) banyak mengandung bahan organik dan (c) tidak mengandung logam berat dan bahan beracun berbahaya (B3). Pada kegiatan rumah tangga atau sejenisnya, limbah ini pada awalnya berupa air sabun, air tinja maupun air berlemak, kadang-kadang terdapat pula bahan ikutan yang berupa bahan padatan. Maka pada umumnya limbah domestik mempunyai indikator antara lain ; (a) biological oxygen demand (BOD), (b) carbon oxygen demand (COD) dan (c) bahan ikutan yang berupa padatan.

2.3.1. Pengolahan Limbah Manusia (*Ekskreta*) dan Aspek Kesehatan Masyarakat

Implikasi terhadap kesehatan manusia dari berbagai variasi sistem pengumpulan dan pengolahan *ekskreta* merupakan hal yang penting sehubungan dengan peranannya dalam mata rantai transmisi penyakit yang ditularkan melalui *ekskreta*. Ada 2 (dua) sistem yang digunakan, yaitu :

a). Sistem kering (*night soil*)

misalnya : *Pit latrines* (kakus lubang gali), *Composting Toilets*, *Cartage Systems* dan *Composting*.

b). Sistem Basah (*sewage*)

Misalnya : *Aquavriy* dan *septic tank*

2.3.2. Sistem Pembuangan Limbah Tinja

Secara garis besar ada 2 (dua) macam sistem pembuangan limbah tinja yang terdapat di perkotaan yaitu :

1. Sistem Pembuangan Setempat (*on site system*)

Pengelolaan secara individu biasanya menggunakan unit pengolahan setempat seperti tangki septik atau dikenal dengan *septic tank*. Limbah ditampung dalam tangki septik atau cubluk dimana penguraian terjadi dan cairannya terserap ke tanah. Hampir sebagian besar kondisi perkotaan di Indonesia, sistem pembuangan setempat ini hanya menerima buangan dari WC keluarga atau komunal, MCK umum dan septik tank. sedangkan untuk air bekas cucian dan dapur masih dialirkan ke saluran drainase/badan air penerima yang ada.

2. Sistem Pembuangan Terpusat (*off site system*)

Dalam sistem pembuangan terpusat ini, limbah tinja yang berasal dari WC keluarga, komunal serta MCK umum dibuang melalui sistem jaringan perpipaan dan akhirnya ditampung kemudian diproses di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berfungsi untuk memproses limbah ekskreta yang berupa air yang mengandung lumpur tinja menjadi air yang memenuhi syarat kualitas air untuk dibuang ke badan penerima seperti sungai, danau atau lainnya.

2.3.3. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sistem pengolahan lumpur tinja yang diterapkan/dibangun menggunakan *Imhoff Tank* dan kolam stabilisasi diantaranya terdiri dari bak fakultatif, bak maturasi dan *sludge drying bed* (SBD) atau bak pengering lumpur.

Fungsi dari masing-masing unit instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah sebagai berikut :

a. Imhoff Tank

Merupakan modifikasi dari tangki septik, proses-proses yang terjadi di dalam tangki septik adalah :

- Proses sedimentasi, adalah proses pemisahan partikel padat (diskrit) melalui pengendapan.
- Proses digesti, adalah proses pembusukan lumpur organik yang terendapkan dan proses ini berlangsung dalam suasana anerobik.

b. Kolam Anaerobik

Berfungsi untuk menguraikan kandungan bahan pencemar organik yang masih terdapat dalam *effluent* septik tank yang biasanya mengandung senyawa organik karbon yang relatif tinggi ($> 7000 \text{ mg/l}$). Fungsi kolam ini mirip dengan septik tank terbuka. Periode tinggal adalah 1- 5 hari dengan kedalaman 2 – 4 meter. Rancangan beban kolam berkisar antara 100 – 400 gram BOD/m²/hari. Yang umum digunakan adalah 250 gram BOD/m²/hari, digunakan pada suhu 20° C.

a. Kolam Fakultatif

Kolam fakultatif dioperasikan pada beban organik yang lebih rendah sehingga memungkinkan pertumbuhan algae pada lapisan atas kolam. Berfungsi untuk menguraikan senyawa organik karbon oleh mikroorganisme secara aerobik

(memerlukan oksigen). Oksigen diperoleh dari hasil fotosintesis ganggang hijau (*Chlorophyta*) dan periode tinggalnya (*retention time*) berkisar antara 5 –30 hari, dengan kedalaman 1 – 1,5 meter.

b. Kolam Maturasi

Kolam maturasi berfungsi untuk pematangan (penguraian lebih sempurna) *effluent* dari kolam fakultatif yang masih mengandung bahan pencemar organik, diharapkan dalam kolam ini terjadi penurunan bakteri *coliform* sampai batas sesuai standar *effluent*. Periode tinggal berkisar 5 –10 hari dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Sejumlah besar *coliform* akan dapat dihilangkan dengan periode tinggal sekitar 5 hari.

c. *Sludge Drying Bed*/bak pengering lumpur.

Berfungsi untuk mengeringkan lumpur yang berasal dari kolam lumpur. Lumpur yang dibiarkan mengering ini berupa “*cake*” yang berwarna gelap serta kasar.

2.4. Kaitan antara Efektivitas Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Limbah Manusia (*Ekskreta*) di Perkotaan

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa bentuk partisipasi masyarakat secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan dan partisipasi dalam tahap operasi pembangunan. Untuk mengukur tingkatan partisipasi masyarakat, dapat digunakan variabel keaktifan, kemampuan dan kemauan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan tahap operasi. Indikator yang dapat digunakan dalam proses perencanaan antara lain tingkat keterlibatan masyarakat yang mencakup kedudukan mereka dalam kepengurusan, kehadiran mereka di dalam rapat atau pertemuan dan keaktifan dalam mengemukakan usulan atau pendapat (Slamet, 1993 : 23 - 25), juga bentuk-bentuk usulan dan keterlibatan

warga dalam pembuatan desain. Sedang indikator partisipasi dalam pelaksanaan dapat dilihat dari seberapa besar mereka turut menyumbangkan tenaga, uang dan material bagi pembangunan, juga adanya masukan dalam perubahan desain bangunan. Adapun indikator partisipasi masyarakat dalam tahap rehabilitasi adalah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek rehabilitasi IPLT.

Berhubung pembangunan IPLT sudah mulai dibangun sejak tahun 1996 sampai 1997 dan aktif beroperasi sejak tahun 1998, maka studi ini difokuskan pada tahap proyek rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana IPLT periode tahun 2001-2006.

Dari definisi mengenai pengelolaan dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan adalah kemampuan untuk menggerakkan tenaga kerja, dana, organisasi dan peralatan dalam kegiatan pengumpulan, penyaluran dan pembuangan limbah tinja untuk mendapatkan kondisi lingkungan yang sehat.

Sedang efektivitas partisipasi merupakan suatu seperangkat aktivitas partisipasi untuk mencapai tujuan, dengan mempergunakan semaksimal mungkin sumber-sumber daya yang ada. Dalam hal ini, aktivitas partisipasi tersebut berupa bentuk atau cara-cara seseorang dalam berpartisipasi. Apakah kegiatan partisipasi mereka mampu memberi kontribusi bagi kehidupan mereka, baik itu secara fisik, seperti peningkatan derajat kesehatan secara sosial dengan meningkatnya status sosial masyarakat dan secara ekonomi seperti peningkatan pendapatan atau penghasilan.

Dari beberapa indikator diatas, pengelolaan limbah tinja akan berhasil apabila pengelolaan tersebut didukung oleh berbagai sumber daya dan sumber dana serta perlunya pelibatan atau partisipasi masyarakat pada tahap rehabilitasi unit pengelolaan limbah tinja dan partisipasi tersebut akan efektif, apabila masyarakat memiliki keaktifan, kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi sehingga partisipasi mereka lakukan telah berada pada

tingkat *degree of citizen power* yaitu masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

BAB III DESKRIPSI WILAYAH STUDI

3.1. Gambaran Umum Kota Palembang

Kota Palembang atau lebih dikenal dengan *Venezia from the east* merupakan salah satu kota di Propinsi Sumatera selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959. Secara Administratif Kota Palembang memiliki luas wilayah ± 400,61 km² (Kantor Statistik Kota Palembang, 2001). Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia setidaknya berumur 1382 tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1968 tanggal 6 Desember 1988 Tentang batas wilayah Kotamadya Palembang, Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir wilayah Kotamadya Palembang meliputi :

- a. Sebelah Utara : Desa pangkalan Benteng, Desa gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyu Asin.
- b. Sebelah Selatan : Desa Bakung Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
- c. Sebelah Timur : Desa Balai Makmur Kecamatan Musi banyu Asin I Kabupaten Dati II Musi banyu Asin.
- d. Sebelah Barat : Desa Sukajadi kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyu Asin.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyebutannya menjadi Pemerintah Kota Palembang. Kotamadya Palembang yang semula hanya terdiri dari 8 wilayah Kecamatan dengan

berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut maka dimekarkan menjadi 14 wilayah kecamatan.

3.2. Kondisi Fisik Wilayah Kota Palembang

Kota Palembang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan terletak diantara $2^{\circ}52'$ sampai $3^{\circ}5'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}37'$ - $104^{\circ}52'$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 12 meter dari permukaan laut. Palembang merupakan daerah tropis dengan angin lembab nisbi, suhu cukup panas yaitu antara $23,4^{\circ} \text{ C}$ - $31,7^{\circ} \text{ C}$ dengan curah hujan terbanyak di bulan April dan curah hujan 453 mm paling sedikit di bulan Juli dengan curah hujan 88 mm. Jarak Kota Palembang yang berdekatan dengan Selat Bangka ($\pm 95 \text{ KM}$). Karena perilaku air sangat berpengaruh berupa adanya pasang surut antara 3 - 5 m. Sebelah timur Kota Palembang merupakan kota air yang hampir 52 % daratnya tergenang air yang terdiri dari 15 % tanah yang tergenang musiman dan 37 % tergenang terus menerus dan 48 % tanah daratan yang tidak tergenang air. Jumlah sungai di Kota Palembang sekitar ± 108 sungai sedang yang masih berfungsi 60 buah dan sisanya berfungsi sebagai saluran pembuangan primer.

Strategi pengembangan wilayah Kota Palembang dirumuskan berdasarkan Skenario Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) yang membagi kota menjadi 9 Bagian Wilayah Kota (BWK) berdasarkan struktur Pusat dan Sub Pusat Pelayanan.

Pelayanan sanitasi masyarakat diartikan sebagai pengelolaan air limbah dari aktivitas manusia (WC dan dapur). Namun pengelolaan limbah dari WC dan air buangan dari dapur tersebut belum sepenuhnya ditangani oleh satu Institusi. Untuk buangan dari WC (buangan manusia) sebagian besar ditangani melalui sistem *On Site* dengan jamban yang dilengkapi septik tank dan jamban yang dibuang langsung ke sungai. Untuk

penanganan penyedotan limbah tinja dari septik tank telah disediakan unit mobil sedot tinja, sedangkan penampungan lumpur tinja disalurkan ke sarana pembuangan IPLT (instalasi pengolahan lumpur tinja) yang ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DKK) Kota Palembang.

3.3. Gambaran Umum Kelurahan Sukajaya Palembang

Kelurahan Sukajaya Palembang terletak di Kecamatan Sukarame dalam lingkup BWK Sukarame yang merupakan SubPusat Wilayah Pengembangan Sukarame. Kelurahan Sukajaya merupakan wilayah kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar dibanding di kelurahan lainnya yang ada di Kota Palembang. Kelurahan Sukajaya memiliki luas wilayah \pm 540 Ha dengan perincian : 254 Ha daerah terbangun dan 286 Ha daerah terbuka. Wilayah Administrasi Kelurahan Sukajaya dibagi dalam 10 RW (Rukun warga) dan 60 RT (Rukun Tetangga) serta 4.454 KK (Kepala Keluarga) dengan kepadatan penduduk rata-rata 39 jiwa/ha. Batas-batas wilayahnya meliputi :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Sukamaju
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Sukabangun
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Sukarame
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Pipareja

Kelurahan Sukajaya adalah wilayah pengembangan permukiman dan menjadi lokasi pendukung fungsi primer kota seperti kawasan TPA Sukajaya.

Dipilihnya Kelurahan Sukajaya Kota Palembang sebagai obyek Penelitian dalam penulisan Pratesis ini, karena disamping memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar, tentunya memiliki permasalahan yang kompleks terutama permasalahan lingkungan dan sanitasi. Hal ini dikarenakan pada area kelurahan tersebut terdapat fasilitas-fasilitas

sarana dan prasarana sanitasi seperti TPA dan IPLT. Oleh karena itu dengan adanya sarana dan prasarana sanitasi ini, jika tidak dikelola dengan baik tentunya masyarakat Kelurahan Sukajaya-lah yang terkena dampak paling dini akibat kesalahan dan kurangnya pemahaman terhadap operasional dan pengelolaan baik secara teknis maupun manajemen IPLT.

3.4. Penduduk dan Karakteristik Masyarakat

Penduduk di Kelurahan Sukajaya memiliki mata pencaharian yang beragam antara lain sebagai buruh (baik itu buruh tani, buruh bangunan, industri, sopir, kernet dan lain-lain), Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI, pedagang , pengusaha, pensiunan dengan jenjang pendidikan yang beragam.

Sektor pertanian dan peternakan mempunyai arti penting bagi penduduk kelurahan Sukajaya. Sektor andalan dibidang ini antara lain jenis tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan jenis tanaman sayur-sayuran seperti tomat, cabe, terong dan mentimun. Sedangkan sektor peternakan yang banyak dijumpai seperti peternakan ayam potong, ayam petelur, bebek, itik, babi, kambing dan sapi.

Dengan keberadaan IPLT dan TPA (tempat pembuangan akhir sampah) di Kelurahan Sukajaya disini cukup berperan dalam menopang kehidupan sebagian warga. Warga yang berada di sekitar lokasi TPA, ada juga yang menjadi pemulung dengan memanfaatkan sampah-sampah yang masih berguna untuk didaur ulang di pabrik, sedang sampah organik dimanfaatkan sebagai pakan ternak penduduk setempat.

Secara umum sifat kegotong-royongan masyarakat di wilayah studi relatif tinggi. Hal ini disebabkan sifat masyarakat pinggiran yang bernuansa agraris yang memiliki ikatan kekeluargaan yang cukup tinggi.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

STUDI EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM
REHABILITASI IPIT DALAM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI KELURAHAN SUKAJAYA PALEMBANG

PETA

KELURAHAN SUKAJAYA PALEMBANG
PROPINSI SUMATERA SELATAN

LEGENDA :



Jalan raya



Jalan lain



Batas lingkungan



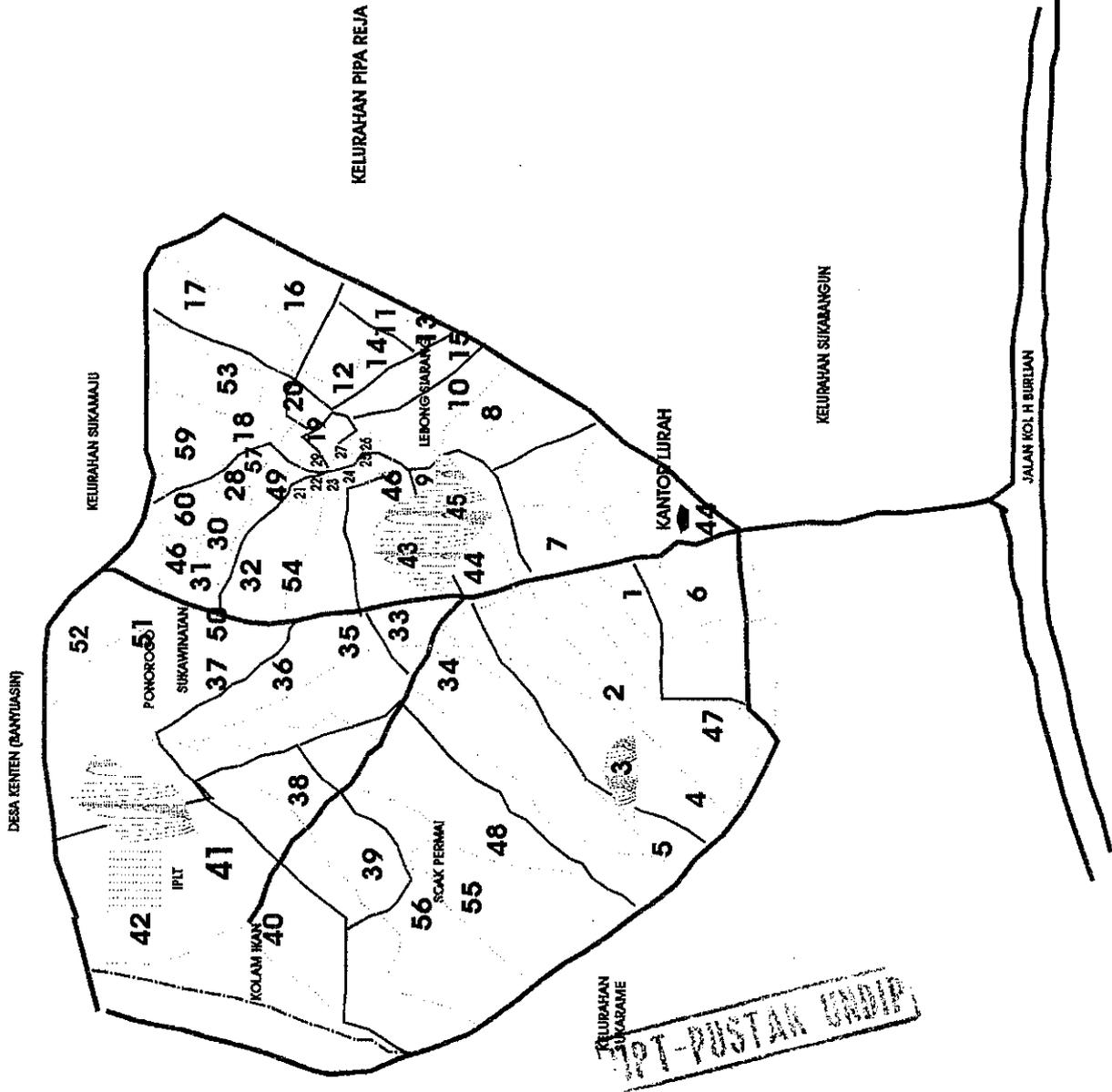
Sungai kecil

SUMBER

KELURAHAN SUKAJAYA PALEMBANG

NO. GAMBAR SKALA UTARA

1 : 125.000





**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SKRIPSI

**STUDI EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PROGRAM REHABILITASI IPLT
DALAM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DI KELURAHAN SUKAJAYA PALEMBANG**

PETA

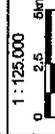
CAKUPAN PELAYANAN IPLT EXISTING
DKK. KOTA PALEMBANG 2002

Legenda :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Lingkar / Arteri
- Jalan Kolektor
- Sungai
- Kantor Kecamatan
- IPLT Sukajaya

SKALA

NO. GAMBAR

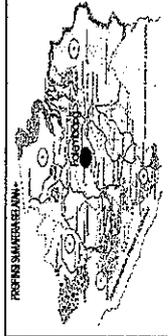
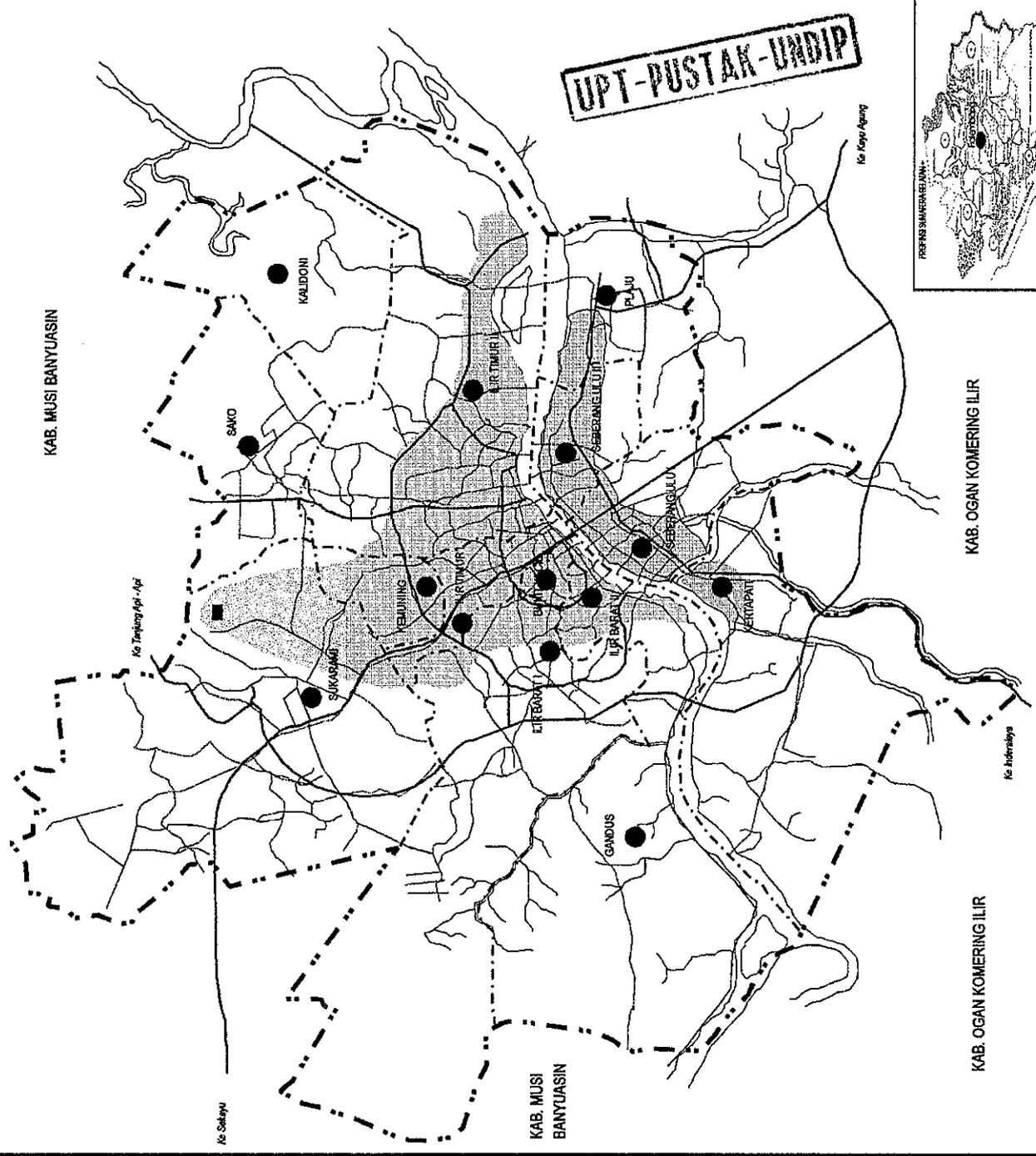


1:1



SUMBER

BAPPEDA KOTA PALEMBANG



BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM REHABILITASI INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) DI KELURAHAN SUKAJAYA PALEMBANG

Analisis efektivitas partisipasi masyarakat di wilayah studi, berdasarkan pada beberapa teori yang telah dibahas pada bab 2 (dua). Pokok-pokok analisis partisipasi masyarakat pada program rehabilitasi IPLT di kelurahan Sukajaya Palembang yang meliputi Partisipasi masyarakat dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan proyek rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), yang dikaitkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, studi tingkat efektivitas partisipasi masyarakat, studi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah khususnya limbah tinja, dan beberapa hasil temuan yang terdapat di wilayah studi.

Kajian tingkat efektivitas partisipasi masyarakat ini, berupa kajian bentuk partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan serta pelaksanaan program rehabilitasi IPLT. Apakah bentuk/metode tersebut telah efektif, yang berarti seluruh aktivitas kepartisipasian telah dilakukan dengan baik atau tidak.

4.1. Studi Partisipasi Masyarakat pada Program Rehabilitasi IPLT dalam upaya Pengelolaan Lingkungan di Kelurahan Sukajaya Palembang

Dalam kajian teori sebagaimana telah diuraikan pada bab dua, partisipasi masyarakat dalam tahap pembangunan atau rehabilitasi adalah pelibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada tingkatan yang berbeda - beda, yaitu dapat dilakukan

pada kegiatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan operasi dari suatu proyek. Berhubung proyek rehabilitasi IPLT tersebut merupakan proyek jangka menengah maka penekanannya adalah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi Unit Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).

4.1.1. Tahap Perencanaan

Tahap ini bila diukur dari derajat keterlibatannya merupakan suatu pelibatan yang paling tinggi dari masyarakat. Karena melalui perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan. Pembuatan keputusan dalam arti sesungguhnya ialah sama dengan perencanaan (Slamet, 1993 : 89). Dengan demikian, warga masyarakat dapat mengemukakan usulan ataupun masukan dalam perencanaan tersebut, dengan harapan aspirasi masyarakat dapat ditampung dan dapat diakomodasi. Aspek-aspek yang dapat dilihat pada tingkat keterlibatan masyarakatnya adalah sebagai berikut :

1. Kehadiran dalam Rapat atau Pertemuan

Dalam aspek ini dapat berlaku tidak harus jadi pengurus, tetapi juga anggotanya. Kehadiran warga dipandang penting di dalam perencanaan, sebab tanpa kehadiran, seseorang tidak mungkin dapat berpartisipasi dalam perencanaan.

2. Keaktifan dalam Mengemukakan Usulan

Aspek ini memperlihatkan seberapa aktif masyarakat mengemukakan usulan bagi kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengajuan usul dapat diterima maupun ditolak. Bagi usulan yang diterima berarti lebih memberikan sumbangan yang lebih besar di dalam perencanaan, begitu pula sebaliknya. Bila mereka pasif, berarti tidak memberikan sumbangan dalam perencanaan.

3. Bentuk-bentuk Usulan

Bentuk-bentuk usulan dapat juga dipakai sebagai ukuran untuk melihat seberapa besar masyarakat terlibat dalam perencanaan. Bentuk usulan yang lebih realistis biasanya yang sering dapat ditampung.

4. Keterlibatan dalam Desain Bangunan

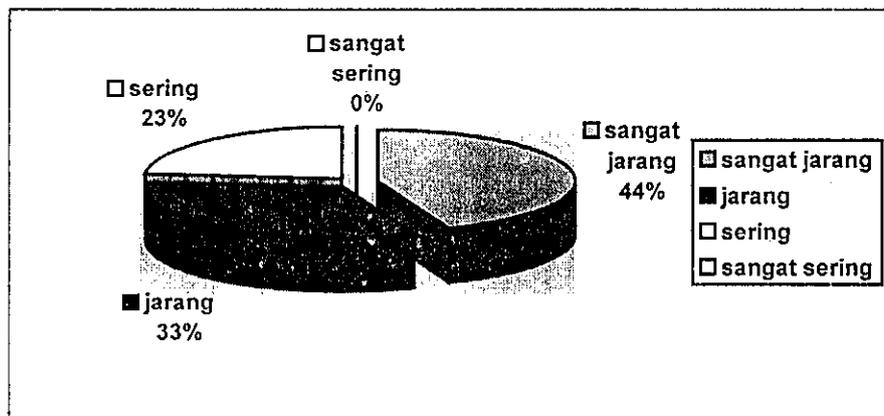
Karena proyek pembangunan rehabilitasi Unit Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) merupakan kegiatan yang sangat menyentuh kehidupan rakyat banyak, maka diharapkan adanya masukan dari masyarakat dalam hal pembuatan desain bangunan yang lebih akomodatif. Karena masyarakat di sekitar lokasi akan lebih paham tentang daerahnya, maka usulan tentang desain bangunan juga dapat dimasukkan dalam pengukuran keterlibatan masyarakat dalam perencanaan.

Bertitik-tolak dari aspek-aspek tersebut diatas, maka untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat di wilayah studi mengetahui perencanaan proyek rehabilitasi IPLT, dapat dilihat dalam tabel IV.1. sebagai berikut :

TABEL IV.1.
DISTRIBUSI PARAMETER PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TAHAP PERENCANAAN

PARAMETER	JAWABAN RESPONDEN				Jumlah
	Sangat jarang	jarang	sering	Sangat sering	
Kehadiran dalam rapat/pertemuan	5	11	14	-	30
Keaktifan dalam mengemukakan usulan	10	10	10	-	30
Bentuk-bentuk usulan	13	13	4	-	30
Keterlibatan dalam desain bangunan	25	5	-	-	30
Jumlah	53	39	28	-	120
Prosentase	44.16 %	32,5 %	23.33 %	0 %	100 %

Sumber : Hasil Survei. 2003



Sumber : Hasil Survei, 2003

GAMBAR 4.1. PROSENTASE AKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP PERENCANAAN

Dari tabel V.1. tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa secara umum masyarakat pernah atau sering menghadiri pertemuan untuk membahas rencana proyek rehabilitasi IPLT tersebut, hanya 5 orang yang sangat jarang hadir, 11 orang jarang hadir dan 14 orang yang sering hadir. Dari ke tiga puluh (30) orang yang hadir tersebut, yang cenderung aktif atau sering mengemukakan usulan hanya 10 orang saja sedang yang lain hanya sesekali saja saja. Adapun bentuk-bentuk usulan yang sering dipertimbangkan hanya 4 orang responden, 13 orang jarang dan 13 orang lainnya sangat jarang. Sedang keterlibatan warga masyarakat dalam desain bangunan, 25 orang menjawab sangat jarang terlibat dan 5 orang menjawab jarang terlibat. Ini berarti bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam desain bangunan. Hal ini dipertegas oleh beberapa pendapat sebagai berikut :

“ Masyarakat sering diajak dalam suatu pertemuan, untuk membahas rencana proyek rehabilitasi Unit Pengolah Lumpur Tinja tersebut. Sebagian memang aktif mengemukakan berbagai usulan, terutama masalah peningkatan dan perbaikan kinerja teknis operasional sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Tetapi untuk membahas desain bangunan, masyarakat kebanyakan ngikut saja, masalahnya itu kan teknis sekali, jadi terserah pemrakarsa saja ” (Wawancara dengan Ketua Rt. 41 Rw.VI, pada hari Minggu, 20 Juli 2003).

“ Kami memang mengundang beberapa tokoh masyarakat termasuk LSM untuk menghadiri pertemuan tentang rencana proyek rehabilitasi IPLT tersebut, beberapa usulan kemudian kami tampung sebagai masukan tetapi kalau desain bangunan secara teknis masyarakat tidak begitu dilibatkan ” (Wawancara dengan Kepala SubSeksi Air Limbah dan WC/Jamban Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, pada hari Senin, 21 Juli 2003).

Dari kedua pendapat tersebut, tampak bahwa masyarakat dalam hal desain bangunan sangat jarang terlibat secara khusus, karena desain bangunan merupakan suatu kegiatan yang bersifat teknis, sehingga dalam hal ini, langsung ditangani pemerintah yang diserahkan kepada pemrakarsa proyek rehabilitasi IPLT.

Untuk melihat pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan proyek rehabilitasi IPLT, maka dibawah ini disajikan tabel pengukuran tingkat partisipasi masyarakat yang diperoleh dari 30 responden, kemudian diberi nilai/bobot yang diakumulasikan dan kemudian dikategorikan dalam tingkat sangat tinggi (ST), Tinggi (T), Rendah (R) dan Sangat Rendah (SR). Tabel pengukuran tersebut sebagaimana disajikan sebagai berikut :

TABEL IV.2.
PENGUKURAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP
PERENCANAAN PROGRAM REHABILITASI IPLT DI KELURAHAN
SUKAJAYA PALEMBANG

No resp.	Aspek – aspek keterlibatan/partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan					
	Frekuensi kehadiran	Keaktifan dalam berdiskusi	Bentuk usulan	Keterlibatan dalam desain	Tingkat Partisipasi (bobot)	Keterangan
1	1.00	1.00	1.00	1.00	4	sangat-rendah
2	2.00	2.00	2.00	1.00	7	sangat-rendah
3	4.00	2.00	2.00	1.00	9	rendah
4	1.00	1.00	1.00	1.00	4	sangat-rendah
5	4.00	4.00	2.00	1.00	11	rendah
6	1.00	1.00	1.00	1.00	4	sangat-rendah
7	2.00	1.00	1.00	1.00	5	sangat-rendah
8	4.00	2.00	2.00	2.00	10	rendah
9	4.00	4.00	4.00	2.00	14	tinggi
10	4.00	4.00	2.00	1.00	11	rendah
11	4.00	4.00	2.00	1.00	11	rendah
12	2.00	1.00	1.00	1.00	5	sangat-rendah
13	2.00	4.00	2.00	1.00	9	rendah
14	2.00	1.00	1.00	1.00	5	sangat-rendah
15	2.00	2.00	2.00	1.00	7	sangat-rendah
16	4.00	4.00	4.00	1.00	13	tinggi
17	4.00	2.00	2.00	2.00	10	rendah
18	4.00	4.00	4.00	1.00	13	tinggi
19	1.00	1.00	1.00	1.00	4	sangat-rendah
20	4.00	4.00	1.00	1.00	10	rendah
21	4.00	2.00	2.00	1.00	9	rendah
22	2.00	2.00	2.00	2.00	8	rendah
23	2.00	1.00	1.00	1.00	5	sangat-rendah
24	2.00	2.00	1.00	1.00	6	sangat-rendah
25	4.00	2.00	2.00	2.00	10	rendah
26	4.00	4.00	4.00	1.00	13	tinggi
27	1.00	1.00	1.00	1.00	4	sangat-rendah
28	2.00	1.00	1.00	1.00	5	sangat-rendah
29	2.00	2.00	1.00	1.00	6	sangat-rendah
30	4.00	4.00	2.00	1.00	11	rendah

Sumber : Hasil survei. 2003

Keterangan :

Bobot Nilai 5 : Sangat sering

Bobot Nilai 4 : Sering

Bobot Nilai 2 : Jarang

Bobot Nilai 1 : Sangat Jarang

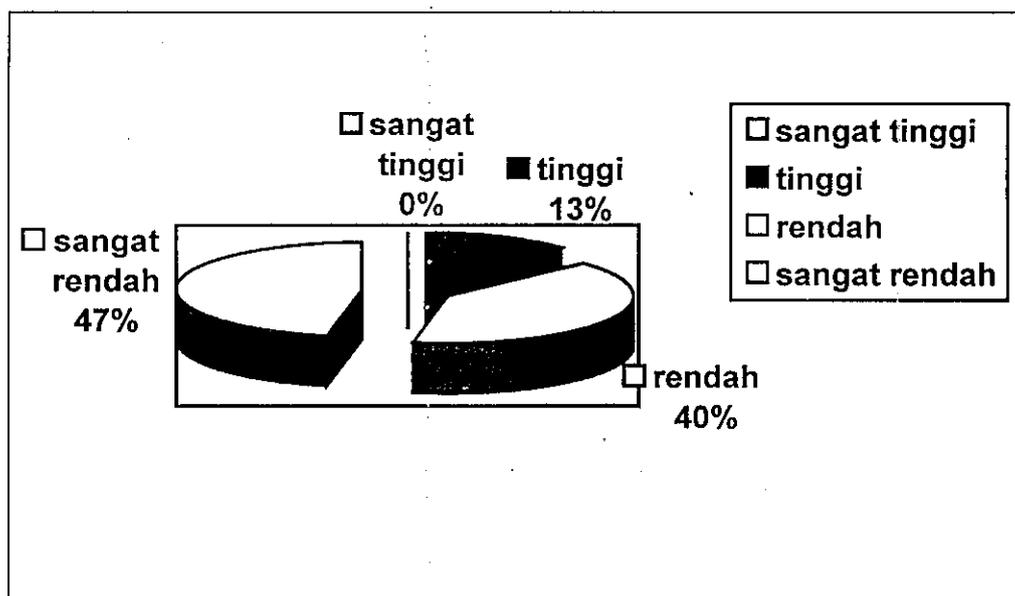
Dari tabel tersebut diatas, untuk mengetahui tinggi rendahnya tiap-tiap variabel partisipasi, maka kumulasi bobot setiap variabel akan menjadi data ordinal tingkat partisipasi masyarakat. Katagori tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL IV.3.
KATAGORI VARIABEL TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
TAHAP PERENCANAAN

KATAGORI	KUMULASI NILAI/BOBOT	FREKUENSI	PROSENTASE
Sangat tinggi	16 – 20	-	0 %
Tinggi	12 – 15	4	13 %
Rendah	8 – 11	12	40 %
Sangat Rendah	4 – 7	14	47 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : Hasil Survei, 2003

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam tahap perencanaan diwilayah studi, apabila dinyatakan dalam prosentase, maka akan terlihat sebagaimana gambar sebagai berikut :



Sumber : Hasil survei, 2003

GAMBAR 4.2.
PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP
PERENCANAAN PROYEK REHABILITASI IPLT

Dari tabel tersebut diatas, tampak bahwa 4 responden atau 13 % memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, 12 responden atau 40 % memiliki tingkat partisipasi yang rendah dan 14 responden atau 47 % memiliki tingkat partisipasi yang sangat rendah dalam tahap perencanaan proyek rehabilitasi IPLT. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di wilayah studi tergolong relatif rendah.

Rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan di wilayah studi ini, terjadi karena bentuk proyek pembangunan rehabilitasi Unit Pengolah Limbah Tinja tersebut sebenarnya bukan merupakan perencanaan dari bawah atau *Bottom Up Planning*, tetapi merupakan proyek pemerintah dan hanya masyarakat tertentu saja yang mengetahui, dalam hal ini aparat Kelurahan, LKMD serta sebagian ketua RT/RW di wilayah tersebut. Sedang masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui komunikasi yang ada, seperti pengumuman di Kelurahan ataupun membaca surat kabar lokal.

“ Kami sebagai warga tidak mengetahui persis rencana proyek rehabilitasi IPLT yang juga ada melibatkan masyarakat tersebut. Tahu-tahu sudah ada proyek, itupun kami yang bertanya kepada aparat yang bertugas di Unit IPLT tapi toh kami berpendapat bahwa wewenang proyek tersebut masih di tangan pemerintah “ (Wawancara dengan Bpk. Romli Rt. 41/VI pada hari Selasa, 22 Juli 2003)

Pendapat senada juga dilontarkan oleh beberapa warga yang berhasil ditemui sebagai berikut :

“ Kita tidak tahu ada rencana proyek perbaikan IPLT tersebut. Limbah Kakus rumah saya dialirkan ke septik tank yang kami buat bersama-sama dengan warga lain” (wawancara dengan Bpk. Ridwan RT.42/VII pada Selasa, 22 Juli 2003)

“ Memang beberapa warga tidak mengetahui rencana program tersebut, tetapi tingkat Kelurahan, pengurus LKMD sudah ada yang diberi tahu dan tindak lanjut informasi ke ketua RT/RW, memang hanya di lokasi IPLT saja yaitu RT. 42 dan RT. 41 (wawancara dengan Kepala Kelurahan Sukajaya pada hari Rabu, 23 Juli 2003).

Dari beberapa pendapat tersebut, menunjukkan bahwa tahapan perencanaan proyek rehabilitasi Unit Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) hanya diikuti sebagian warga saja, yaitu aparat kelurahan, sebagian Ketua RT/RW, pengurus LKMD dan sebagian tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena *Bottom-Up Planning* masih nampak dalam tingkat yang terbatas dalam perencanaannya. Keterlibatan masyarakat walaupun terbatas, terlihat dari partisipasi warga dalam pertemuan-pertemuan, kehadiran dan usulan-usulan mereka dalam pertemuan yang diadakan. Walaupun proyek tersebut merupakan proyek pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lingkungan bagi sebagian

warga masyarakat Palembang pada umumnya, masyarakat Kelurahan Sukajaya sedikit banyak dilibatkan meskipun dalam tingkat yang terbatas. Sehingga dalam perencanaan baik sumber dana dan pelaksanaan program rehabilitasinya peran pemerintah sangat besar. Rencana program hanya difahami oleh aparat kelurahan, pengurus LKMD serta tokoh masyarakat dan LSM tetapi sedikit melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga dalam hal ini, suara masyarakat hanya terwakili sekelompok orang tertentu saja. Masyarakat hanya mengetahui rencana proyek tersebut, melalui media informasi yang ada, dan bila dilakukan dengar pendapat, mereka tidak mempunyai otoritas dalam membuat keputusan.

Proses partisipasi masyarakat yang terjadi dapat dianalisis dengan menggunakan pengukuran skala tingkat partisipasi masyarakat (*Ladder of Citizen Participation*) dari Sherry Arnstein, yang terdiri dari *delapan tangga partisipasi masyarakat*. Tangga (1) manipulasi dan (2) perbaikan, disimpulkan sebagai tingkat bukan partisipasi. Tingkat (3) informasi dan (4) konsultasi disebut sebagai tingkatan *tokenisme* atau sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara. Namun demikian suara atau pendapat mereka belum tentu menjadi bahan bagi pengambilan keputusan. Bentuk (5) penentrangan dipandang sebagai tokenisme pada tingkat yang lebih tinggi, dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan *advice* tetapi kekuasaan untuk pengambilan keputusan tetap ditangan pemrakarsa kegiatan. Pada tangga ke (6) kerjasama, masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam *trade off* dengan para pemegang kekuasaan. Pada tingkat ke (7) penderahan kekuatan dan (8) kontrol masyarakat, dalam hal ini masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

Dalam hal ini proses partisipasi masyarakat di Kelurahan Sukajaya Palembang adalah berbentuk :

1. Informasi

Program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah baik tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota maupun Pusat, yang dilaksanakan di Kelurahan, diinformasikan kepada warga melalui media komunikasi tulisan atau gambar (famlet, pengumuman dan sejenisnya). Dengan demikian, tingkat partisipasi seperti ini termasuk dalam tingkat *Tokenisme* atau sekedar formalitas, yang memungkinkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, meskipun suara atau pendapat mereka belum tentu menjadi bahan pengambilan keputusan.

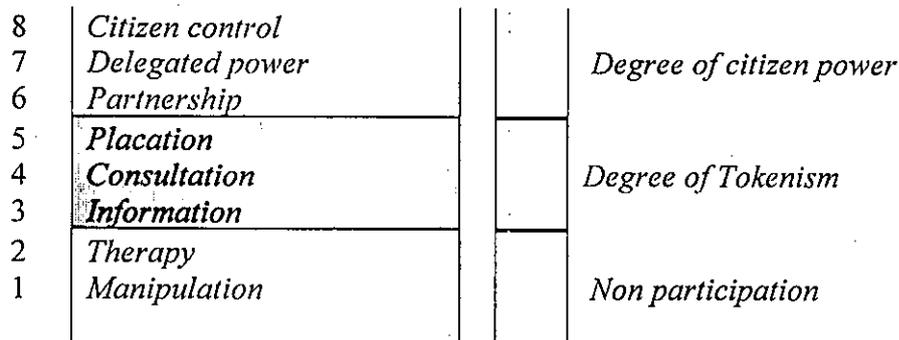
2. Konsultasi

Dalam tingkat konsultasi ini, program pembangunan tetap merupakan program pemerintah, namun pemberian informasi dilakukan pada pertemuan atau dengar pendapat warga. Sehingga dengan demikian, dapat dianggap bahwa warga tidak hanya diberikan informasi saja, tetapi juga dapat mengeluarkan pendapat, tetapi seringkali masukan dari warga sangat terbatas, atau cuma didengar tapi tidak dipertimbangkan.

3. Penentruman

Karena suara warga hanya terwakili oleh sekelompok orang saja, dalam hal ini LKMD yang merupakan salah satu lembaga wakil masyarakat. Setiap proyek pembangunan yang merupakan paket pemerintah peran LKMD akan besar. Sehingga dalam hal ini LKMD dapat dianggap sebagai “Badan Pembuat Keputusan” karena pengurus-pengurus LKMD bukan hanya wakil warga tetapi juga aparat Kelurahan. Kenyataannya yang sering terjadi adalah peran pembuat keputusan tetap ditangan aparat pemerintah.

Apabila digambarkan dalam diagram tangga partisipasi dari Sherry Arnstein, maka posisi partisipasi masyarakat di wilayah studi dalam tahap perencanaan program rehabilitasi IPLT, akan tampak seperti gambar sebagai berikut :



Sumber : Hasil Analisis. 2003

GAMBAR 4.3.
POSISI PARTISIPASI MASYARAKAT DI WILAYAH STUDI
DALAM TANGGA PARTISIPASI MASYARAKAT

Gambar yang diarsir merupakan tingkatan partisipasi masyarakat di wilayah studi, yaitu pada tingkatan (3) informasi dan (4) konsultasi, disebut sebagai tingkatan tokenisme atau sekedar formalitas, dimana masyarakat dapat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara. Namun demikian, suara atau pendapat mereka belum tentu menjadi bahan bagi pengambil keputusan. Bentuk yang ke (5) penentraman, dipandang sebagai tokenisme pada tingkat yang lebih tinggi, dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan *advice* tetapi kekuasaan untuk mengambil keputusan tetap ditangan pemrakarsa kegiatan.

Dari ketiga tingkat partisipasi di atas, dapat dikatakan bahwa di wilayah studi, program rehabilitasi Unit Pengolah Limbah Tinja (IPLT) sudah direncanakan oleh “ atas “ hanya diketahui oleh sebagian warga masyarakat tertentu saja yaitu pengurus LKMD, sebagian Ketua RT/RW, aparat kelurahan dan sebagian kecil tokoh masyarakat. Warga hanya diinformasikan melalui media Kelurahan yang sangat terbatas dan tidak mempunyai

otoritas dalam pembuatan keputusan, meskipun telah diadakan forum dengar pendapat warga. Informasi yang telah diberikan tersebut, tentu berusaha untuk meyakinkan warga masyarakat bahwa program pembangunan rehabilitasi IPLT tersebut, bermanfaat bagi mereka. Pemberian informasi satu arah (tingkat partisipasi informasi) dan dua arah (tingkat partisipasi konsultasi). Informasi tersebut diperlukan, untuk menyiapkan masyarakat agar bersedia dirangsang dan menerima gerak perubahan pembangunan yang diperlukan, dalam hal ini adanya proyek rehabilitasi unit Pengolah lumpur Tinja. Ini berarti bahwa melalui informasi tersebut, harus dimungkinkan terjadinya ide atau pikiran serta motivasi dalam masyarakat. sehingga dengan demikian, masyarakat akan mau dan bersedia menerima rangsang atau gerak maju dari kondisi yang kurang sehat karena membuang limbah tinja yang langsung dialirkan ke parit/selokan dan sungai, menuju keadaan yang lebih sehat, yaitu dengan adanya proyek perbaikan/rehabilitasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan warga Palembang pada umumnya dan warga Kelurahan Sukajaya pada khususnya.

4.1.2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas nyata, dari program yang telah digariskan. Partisipasi dalam tahap ini akan bergantung pada peran serta pada tahap perencanaan. Partisipasi pada tahap pelaksanaan akan berlangsung dengan baik, apabila partisipasi masyarakat dalam perencanaan sudah terwujud dengan baik. Warga yang sudah terlibat dalam perencanaan, tentunya akan mengetahui dan cenderung terlibat pula dalam pelaksanaannya. Aspek yang dapat dilihat dalam tahapan ini adalah :

1. Sumbangan Tenaga

Sumbangan tenaga biasanya diberikan oleh masyarakat yang ekonominya rendah. Hal ini dapat difahami mengingat keterbatasan dana yang mereka miliki. Sebagian warga masyarakat akan berfikiran, lebih baik menyumbangkan tenaga pada kegiatan yang akan dilaksanakan, daripada menyumbangkan uang yang sangat mereka butuhkan.

2. Sumbangan Uang

Sumbangan uang akan diberikan oleh warga yang cukup mampu dan terpendang di daerahnya. Karena kesibukan sehari – hari dengan pekerjaannya, ataupun merasa memiliki uang, mereka beranggapan lebih luwes kalau menyumbangkan uang. Sumbangan uang dapat juga diberikan, karena pemberi sumbangan memang malas untuk memberikan sumbangan tenaga.

3. Sumbangan Material

Sumbangan berwujud barang, seringkali tidak terbatas pada kelas sosial tertentu, tetapi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Namun demikian, sumbangan material ini, seringkali diberikan oleh orang yang cukup mampu ataupun memiliki kesibukan.

4. Masukan dalam Perubahan Desain bangunan

Masukan dalam perubahan desain bangunan sangat mungkin terjadi pada saat proyek sedang berlangsung, karena bisa saja ditengah jalan, pelaksanaan suatu proyek tidak sesuai dengan rencana semula.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap ini, maka distribusi parameter partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

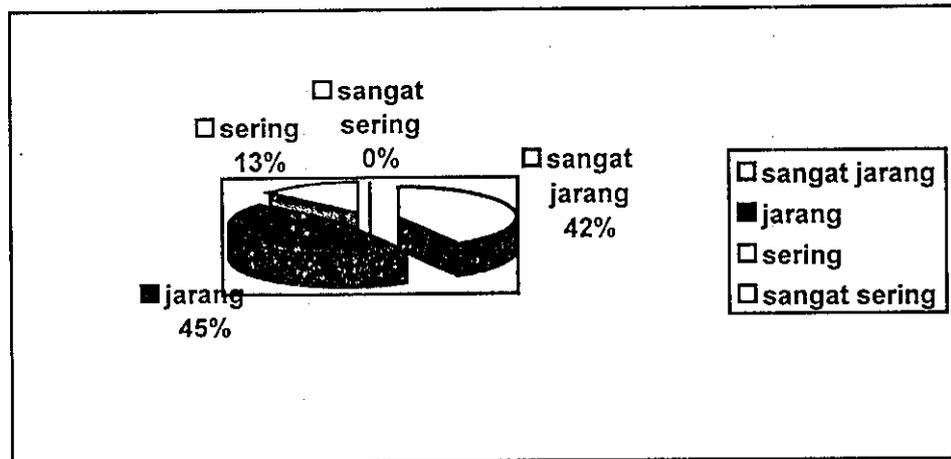
TABEL IV.4.
DISTRIBUSI PARAMETER PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TAHAP PELAKSANAAN

PARAMETER	JAWABAN RESPONDEN				
	Sangat jarang	jarang	sering	Sangat sering	jumlah
Sumbangan Tenaga	7	16	7	-	30
Sumbangan Uang	14	16	-	-	30
Sumbangan Material	11	16	3	-	30
Masukan dalam perubahan desain	18	6	6	-	30
Jumlah	50	54	16	-	120
Prosentase	41,66 %	45 %	13,33 %	0 %	100 %

Sumber : Hasil Survei, 2003

Dari tabel diatas, dari 30 responden hanya 7 orang yang sering menyumbangkan tenaga selebihnya 16 orang jarang dan 7 orang sangat jarang menyumbangkan tenaga. Sumbangan uang boleh dikatakan jarang dilakukan terlihat 14 orang yang sangat jarang menyumbang uang dan 16 orang yang jarang. Sumbangan material juga demikian hanya 3 orang saja yang sering menyumbang sedang selebihnya 11 orang sangat jarang dan 16 orang jarang. Dalam hal sumbangan yang berupa masukan dalam perubahan desain hanya sebagian kecil saja yaitu sebanyak 6 orang dan 18 orang sangat jarang dan 6 orang saja yang jarang. Ini berarti bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap ini dapat dikatagorikan rendah.

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan, apabila dinyatakan dalam gambar secara prosentase, akan terlihat dalam gambar di bawah ini :



Sumber : Hasil Survei, 2003

GAMBAR 4.4.
PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP
PELAKSANAAN PROYEK REHABILITASI IPLT

Dari gambar diatas, maka terlihat bahwa 13 % saja responden yang sering terlibat dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi IPLT, 45 % jarang terlibat dan 45 % sangat jarang terlibat. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan proyek tidak banyak melibatkan masyarakat.

Dalam tahap pelaksanaan ini, keterlibatan masyarakat tentang adanya pelaksanaan proyek cenderung juga rendah, karena masyarakat kurang mengetahui persis mengenai pelaksanaan proyek tersebut. Berikut penuturan Ketua RT. 52/IX :

“ Itu kan proyek pemerintah, jadi dalam hal pelaksanaan kita kurang diikuti, paling-paling kita hanya membantu urun rembuk saja. Ada juga masyarakat yang terlibat tetapi sebagai tenaga atau tukang batu dan dibayar pada saat pelaksanaan rehabilitasi ” (wawancara dengan ketua RT. 52/IX, pada hari Rabu, 23 Juli 2003)

Dari survei yang telah dilakukan dan dari pendapat tersebut, jelas terlihat bahwa pelaksanaan rehabilitasi Unit Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam arti yang sebenarnya dan kalaupun ada hanya berupa pemikiran.

Proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah memang sering langsung ditangani oleh pemerintah yang pelaksanaannya telah diserahkan kepada kontraktor melalui tender atau lelang, untuk menentukan kualifikasi bagi kontraktor yang memenuhi syarat. Sehingga dalam hal ini, bentuk pembangunannya pun telah diborongkan kepada kontraktor yang menang dalam tender atau lelang. Tentunya mereka telah memiliki berbagai sumber daya manusia sendiri. Dan sekalipun melibatkan masyarakat sekitar lokasi proyek rehabilitasi, akan terbatas sekali, misalnya seperti tukang batu dan pekerja kasar lainnya.

Untuk melihat pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan di wilayah studi, maka berikut ini disajikan tabel pengukuran tingkat partisipasi masyarakat yang diperoleh dari 30 responden yang dijumpai sebagaimana aspek yang telah dikemukakan diatas, yang diberi bobot atau nilai yang diakumulasikan dan kemudian dikategorikan dalam tingkat sangat tinggi, tinggi, rendah dan sangat rendah. Tabel partisipasi masyarakat tersebut sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL IV.5.
PENGUKURAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA TAHAP
PERENCANAAN PROGRAM REHABILITASI IPLT DI KELURAHAN
SUKAJAYA PALEMBANG

No Resp.	Aspek – aspek partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan					Keterangan
	sumbangan tenaga	sumbangan uang	sumbangan material	masukan dalam perub. Desain	tingkat Partisipasi (bobot)	
1	1	1	1	1	4	sangat-rendah
2	4	2	2	1	9	rendah
3	4	2	2	1	9	rendah
4	1	1	1	1	4	sangat-rendah
5	4	2	2	1	9	rendah
6	1	1	1	1	4	sangat-rendah
7	2	1	1	1	5	sangat-rendah
8	2	2	2	2	8	rendah
9	2	2	4	4	12	tinggi
10	1	1	1	1	4	sangat-rendah
11	2	2	2	4	10	rendah
12	2	1	1	2	6	sangat-rendah
13	1	1	1	1	4	sangat-rendah
14	4	1	2	1	8	rendah
15	2	2	2	1	7	sangat-rendah
16	2	2	4	4	12	tinggi
17	4	2	2	2	10	rendah
18	4	2	2	1	9	rendah
19	1	1	1	1	4	sangat-rendah
20	2	2	2	4	10	rendah
21	2	2	2	2	8	rendah
22	2	2	2	2	8	rendah
23	2	1	1	1	5	sangat-rendah
24	2	1	2	1	6	sangat-rendah
25	2	2	2	2	8	sangat-rendah
26	4	2	4	4	14	tinggi
27	1	1	1	1	4	sangat-rendah
28	2	1	1	1	5	sangat-rendah
29	2	1	2	1	6	sangat-rendah
30	2	2	2	4	10	rendah

Sumber : Hasil survei. 2003

Keterangan :

Bobot Nilai 5 : Sangat sering

Bobot Nilai 4 : Sering

Bobot Nilai 2 : Jarang

Bobot Nilai 1 : Sangat Jarang

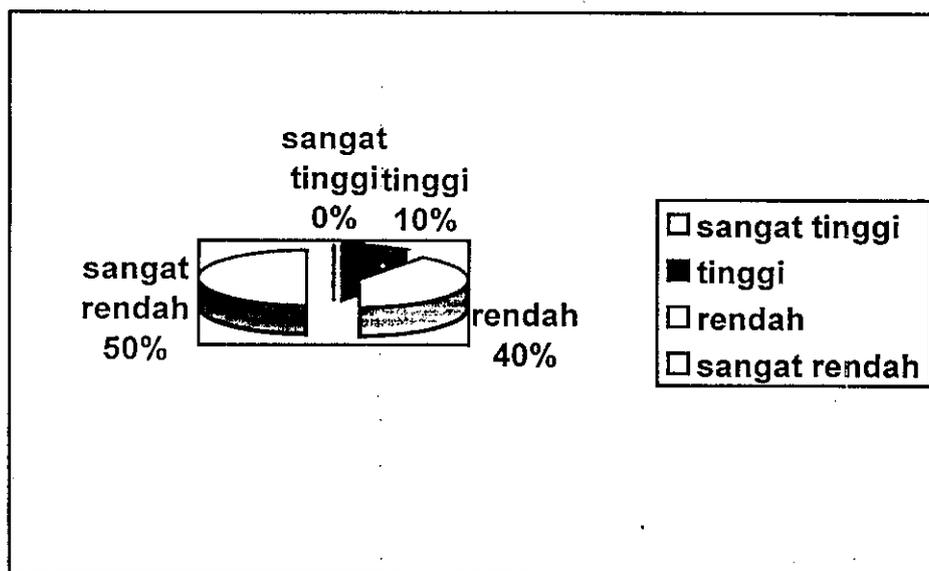
Dari tabel tersebut diatas, untuk mengetahui tinggi rendahnya tiap tiap variabel, maka kumulasi bobot setiap parameter akan menjadi data ordinal tingkat partisipasi masyarakat . Katagori tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL IV.6
KATAGORI VARIABEL TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
TAHAP PELAKSANAAN

KATAGORI	KUMULASI NILAI/BOBOT	FREKUENSI	PROSENTASE
Sangat tinggi	16 – 20	-	0 %
Tinggi	12 – 15	3	10 %
Rendah	8 – 11	12	40 %
Sangat Rendah	4 – 7	15	50 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : Hasil Survei, 2003

Tingkat partisipasi masyarakat bila digambarkan sebagaimana di bawah ini :



Sumber : Hasil Survei, 2003

GAMBAR 4.5.
GRAFIK PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
TAHAP PELAKSANAAN PROYEK REHABILITASI IPLT

Dari gambar tersebut diatas, nampak bahwa dalam tahap pelaksanaan proyek rehabilitasi IPLT, 3 orang atau 10 % responden memiliki tingkat partisipasi tinggi, 12 orang atau 40 % memiliki tingkat partisipasi rendah dan 15 orang atau 50 % memiliki tingkat partisipasi sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahap pelaksanaan sebagian besar masyarakat tidak terlibat.

Ketidak-ikutan warga dalam tahap ini, terjadi karena bentuk pembangunan rehabilitasi IPLT tersebut tahap pelaksanaannya dari pemerintah dan hanya masyarakat tertentu saja yang terlibat dan sebagian kecil saja masyarakat yang terlibat, bentuk sumbangan yang diberikan sebagian kecil berupa sumbangan tenaga, material dan masukan dalam perubahan desain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayah studi tidak terlibat dalam tahap pelaksanaan proyek pembangunan rehabilitasi IPLT. Hal ini dimungkinkan, karena bentuk pelaksanaan proyek tersebut segala biaya, tenaga dan materialnya sebagian besar telah disediakan pemerintah, melalui kontraktor pelaksana, yang telah menyediakan berbagai sumber daya yang cukup, sehingga partisipasi masyarakat yang ada sangat terbatas.

TABEL IV.7 DATA – DATA PRIBADI RESPONDEN

No	Jenis Kelamin	Tingkat pendapatan	Mata pencaharian	usia	Tingkat pengetahuan
1	P	tdk tetap	lain lain	25-29	lulus SMU
2	L	200-500	buruh	30-39	lulus SMU
3	L	501-750	buruh	25-29	lulus SMU
4	P	200-500	buruh	40-49	lulus SMU
5	L	751-1juta	PNS/TNI	40-49	lulus akademi
6	L	501-750	pedagang	30-39	lulus SMU
7	P	200-500	pedagang	30-39	lulus SMU
8	L	751-1juta	pedagang	40-49	lulus akademi
9	L	>1juta	pengusaha	40-49	lulus universitas
10	L	751-1juta	PNS/TNI	30-39	lulus akademi
11	L	751-1juta	pedagang	40-49	lulus universitas
12	L	751-1juta	PNS/TNI	40-49	lulus SMU
13	L	501-750	pensiunan	50-59	lulus SMU
14	L	tdk tetap	buruh	30-39	lulus SMU
15	L	501-750	pedagang	30-39	lulus SMU
16	L	>1juta	pedagang	40-49	lulus universitas
17	L	751-1juta	pedagang	40-49	lulus akademi
18	L	501-750	PNS/TNI	30-39	lulus SMU
19	L	501-750	lain lain	25-29	lulus SMU
20	L	501-750	pedagang	25-29	lulus akademi
21	L	751-1juta	pedagang	30-39	lulus akademi
22	L	751-1juta	PNS/TNI	40-49	lulus universitas
23	L	501-750	buruh	30-39	lulus SMU
24	L	200-500	buruh	30-39	lulus SMU
25	L	751-1juta	pedagang	40-49	lulus akademi
26	L	501-750	pedagang	40-49	lulus SMU
27	L	501-750	buruh	30-39	lulus SMU
28	L	501-750	pedagang	30-39	lulus SMU
29	L	501-750	buruh	30-39	lulus SMU
30	L	751-1juta	PNS/TNI	40-49	lulus akademi

Sumber : Hasil Survei, 2003

4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proyek rehabilitasi IPLT dalam upaya pengelolaan lingkungan, aspek-aspek yang dapat dilihat meliputi Jenis Kelamin/Sex, Usia, Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendapatan dan Mata Pencaharian.

Adapun karakteristik responden di wilayah studi berdasarkan aspek tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL IV. 8
PROSENTASE DATA RESPONDEN DI WILAYAH STUDI

No.	VARIABEL	JUMLAH	PROSENTASE
1	SEX/JENIS KELAMIN		
	- Perempuan	3	10 %
	- Laki-laki	27	90 %
	Jumlah	30	100 %
2	USIA		
	- 25 - 29	4	13,3 %
	- 30 - 39	13	43,3 %
	- 40 - 49	12	40 %
	- 50 - 59	1	3,3
	Jumlah	30	100 %
3	TINGKAT PENGETAHUAN		
	- Lulus SMU	18	60 %
	- Lulus Akademi	8	26,7 %
	- Lulus Universitas	4	13,3 %
	Jumlah	30	100 %
4	TINGKAT PENDAPATAN		
	- Tidak tetap	2	6,7 %
	- Rp.200.000 – Rp. 500.000	4	13,3 %
	- Rp.501.000 – Rp. 750.000	12	40 %
	- Rp.751.000 – Rp. 1.000.000	10	33,3 %
	- > 1 juta	2	6,7 %
	Jumlah	30	100 %
5	MATA PENCAHARIAN		
	- Lain-lain	2	6,7 %
	- Pensiunan	1	3,3 %
	- PNS/TNI-POLRI	6	20 %
	- Buruh	8	26,7 %
	- Pedagang	12	40 %
	- Pengusaha	1	3,3 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber : Hasil Survei, 2003

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan faktor-faktor kemampuan yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai berikut :

1. Sex/Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin akan menentukan seseorang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini keterlibatan seorang pria dalam berpartisipasi akan cenderung lebih besar dari

wanita. Hal tersebut diatas, jumlah responden laki-laki sebanyak 27 orang atau 90 % dan responden wanita 3 orang atau 10 %. Dari ke-3 (tiga) responden wanita tersebut 2 orang diantaranya mewakili suami mereka yang bekerja di luar kota, sementara yang satu wanita lagi adalah seorang janda yang ditinggal mati suami. Dengan demikian kecenderungan untuk berpartisipasi akan tinggi.

2. Usia

Perbedaan usia akan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat perbedaan mengenai senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dengan golongan muda. Di wilayah studi usia responden antara 25 – 29 tahun sebanyak 4 orang atau 13,3 %, usia 30 –39 sebanyak 13 orang atau 43,3 %, usia 40 – 49 sebanyak 12 orang atau 40 % dan usia 50 –59 sebanyak 1 orang atau 3,3 %. Disini tampak bahwa golongan tua dalam usia produktif di wilayah studi masih mendominasi dalam berpartisipasi. Sedang golongan tua usia diatas 50 tahun sudah jarang aktif karena alasan kesehatan dan kaderisasi kepada yang lebih muda.

3. Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan akan membedakan seseorang dalam menangkap perspektif tentang partisipasi. Semakin mereka berada pada jenjang pendidikan yang tinggi, maka akan makin luas pula pengetahuan tentang usaha-usaha partisipasi. Tingkat pengetahuan dari 30 responden, lulus SMU atau sederajat sebanyak 18 orang atau 60 %, lulus Akademi 8 orang atau 26,7 % dan lulus Universitas 4 orang atau 13,3 %.

4. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan, akan mempengaruhi seseorang untuk berperan serta. Penduduk yang lebih kaya, akan lebih suka mengeluarkan sumbangan uang daripada yang lebih miskin yang lebih suka menyumbangkan tenaga. Tingkat pendapatan responden di

wilayah studi sangat bervariasi. 2 orang atau 6,7 % berpenghasilan tidak tetap, 4 orang responden atau 13,3 % berpenghasilan Rp. 200.000.- Rp. 500.000., 12 orang atau 40 % berpenghasilan Rp. 501.000.- Rp.750.000., 10 orang atau 33,3 % berpenghasilan Rp.751.000.- Rp. 1000.000. dan 2 orang atau 6,7 % berpenghasilan diatas 1 juta.

5. Mata Pencaharian

Bagi penduduk yang bekerjanya memiliki kesibukan yang luar biasa, memiliki perbedaan dalam hal berpartisipasi dibandingkan dengan penduduk yang bekerjanya cenderung lebih santai, karena lebih banyak memiliki waktu untuk terlibat dalam kegiatan di lingkungannya.

Adapun mata pencaharian responden juga bervariasi. 1 orang atau 3,3 % yang bekerja sebagai pensiunan, 6 orang atau 20 % bekerja sebagai PNS/TNI-POLRI, 8 orang atau 26,7 % bekerja sebagai buruh, 12 orang atau 40 % sebagai pedangang, 1 orang atau 3,3 % bekerja sebagai pengusaha dan 2 orang atau 6,7 % bekerja di bidang lain-lain.

Masyarakat di wilayah studi apabila dilihat dari tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan dan faktor-faktor lain sebagaimana telah dibahas diatas, tidak ada alasan untuk tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Pendek kata bahwa masyarakat dipandang cukup memiliki kemampuan untuk berperan serta. Namun demikian, faktor-faktor tersebut apabila dikaitkan dengan tingkat partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek rehabilitasi, hanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang (*crosstab*), dengan hasil perhitungan melalui SPSS sebagaimana dalam tabel berikut ini :

TABEL IV.9
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE

	A	B	C	D	E	F	G	H
Jenis Kelamin	6,56	6,67	4,35	0,67	3,7	3,81	5,78	2,22
Usia	13,50	6,50	8,67	9,00	6,68	8,16	8,04	16,90
Tingkat Pengetahuan	17,02	11,83	16,41	9,30	5,66	11,97	14,51	20,09
Tingkat Pendapatan	14,13	13,10	27,96	9,12	6,21	8,83	22,91	26,22
Mata Pencaharian	20,16	15,50	16,25	7,80	14,13	9,57	16,96	15,55

Sumber : Hasil Analisis 2003

Tahap Perencanaan :

- A : Frekuensi kehadiran dalam pertemuan
- B : Keaktifan dalam mengemukakan usulan
- C : Bentuk-bentuk usulan
- D : Keterlibatan dalam desain bangunan

Tahap Pelaksanaan :

- E : Sumbangan tenaga
- F : Sumbangan Uang
- G : Sumbangan material
- H : Masukan dalam perubahan desain

TABEL IV.10
HASIL UJI PROBABILITAS

	A	B	C	D	E	F	G	H
Jenis Kelamin	0,038	0,036	0,11	0,41	0,15	0,51	0,56	0,33
Usia	0,036	0,37	0,19	0,03	0,35	0,043	0,23	0,01
Tingkat Pengetahuan	0,002	0,019	0,003	0,01	0,22	0,003	0,006	0,00
Tingkat Pendapatan	0,078	0,108	0,000	0,06	0,623	0,065	0,03	0,001
Mata Pencaharian	0,028	0,16	0,09	0,16	0,146	0,088	0,075	0,11

Sumber : Hasil Analisis 2003

Tahap Perencanaan :

- A : Frekuensi kehadiran dalam pertemuan
- B : Keaktifan dalam mengemukakan usulan
- C : Bentuk-bentuk usulan
- D : Keterlibatan dalam desain bangunan

D : Keterlibatan dalam desain bangunan

Tahap Pelaksanaan :

E : Sumbangan tenaga

F : Sumbangan Uang

G : Sumbangan material

H : Masukan dalam perubahan desain

Dari hasil perhitungan *chi square* menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel jenis kelamin dengan variabel : frekuensi kehadiran, keaktifan dalam berdiskusi, keterlibatan dalam desain bangunan dan sumbangan tenaga. Tetapi dari uji probabilitas dengan derajat kebebasan (df) = 0,05, menunjukkan hanya hubungan variabel jenis kelamin dengan variabel frekuensi kehadiran (A) dan keaktifan dalam mengemukakan usulan (B) saja yang memiliki hubungan yang erat atau signifikan, sedangkan dengan variabel keterlibatan dalam desain bangunan (D) dan sumbangan tenaga (E) hubungannya sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih aktif dalam mengikuti berbagai pertemuan dan dalam hal berdiskusi dan mengemukakan usul karena kaum laki-laki adalah kepala keluarga sehingga umumnya di wilayah studi jika ada undangan rapat atau pertemuan maka kaum laki-lakilah yang sering hadir, sedang kaum perempuan lebih banyak mengurus keluarga di rumah.

Untuk variabel usia, perhitungan *chi square* menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel usia dengan variabel : frekuensi kehadiran, keterlibatan dalam desain bangunan, sumbangan uang dan masukan dalam perubahan desain. Begitu juga dari uji probabilitas dengan derajat kebebasan (df) = 0,05, menunjukkan ada hubungan variabel usia dengan variabel frekuensi kehadiran (A), mengemukakan usulan (B), keterlibatan dalam desain (D), sumbangan uang (F) dan masukan dalam perubahan desain (H) yang memiliki hubungan yang erat atau signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa usia seseorang

di wilayah studi berpengaruh terhadap kematangan dalam berfikir dan mengendalikan emosi serta keaktifan dalam berpartisipasi.

Untuk variabel tingkat pengetahuan, perhitungan *chi square* menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel tingkat pengetahuan dengan variabel : frekuensi kehadiran, keaktifan dalam berdiskusi, bentuk-bentuk usulan, keterlibatan dalam desain bangunan, sumbangan uang, sumbangan material dan masukan dalam perubahan desain bangunan. Dari uji probabilitas dengan derajat kebebasan (df) = 0,05, menunjukkan ada hubungan yang erat (signifikan) antara variabel tingkat pengetahuan dengan variabel frekuensi kehadiran (A), keaktifan dalam mengemukakan usulan (B), bentuk-bentuk usulan (C), keterlibatan dalam desain (D), sumbangan uang (F), sumbangan material (G) dan masukan dalam perubahan desain (H). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap pola pikir, tingkat kekritisian (rasionalitas) dalam memandang suatu persoalan.

Untuk variabel tingkat pendapatan, perhitungan *chi square* menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel tingkat pendapatan dengan variabel : bentuk-bentuk usulan, sumbangan material dan masukan dalam perubahan desain bangunan. Dari uji probabilitas dengan derajat kebebasan (df) = 0,05, menunjukkan ada hubungan yang erat (signifikan) antara variabel tingkat pendapatan dengan ke-3 variabel tersebut diatas yaitu : bentuk-bentuk usulan (C), sumbangan material (G) dan masukan dalam perubahan desain (H).

Untuk variabel mata pencaharian, perhitungan *chi square* menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel mata pencaharian dengan variabel : frekuensi kehadiran dalam pertemuan (B). Dari uji probabilitas dengan derajat kebebasan (df) = 0,05, menunjukkan ada hubungan yang erat (signifikan) antara variabel mata pencaharian dengan variabel frekuensi kehadiran (A). Disini menunjukkan bahwa pekerjaan seseorang

mempengaruhi tingkat aktivitas kehadiran. Dalam hal ini seseorang dalam pekerjaannya banyak memiliki waktu luang maka kesempatan untuk hadir dalam rapat atau pertemuan akan lebih banyak.

Dari beberapa faktor tersebut diatas, masih ada faktor lain yang tidak dapat diukur atau dikuantifikasi, yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, yaitu faktor di luar kemampuan masyarakat seperti faktor interaksi dan komunikasi yang terjadi serta peran serta aparat dalam hal ini Kelurahan dan LKMD untuk menumbuh kembangkan pelibatan aktif warganya.

Peran lembaga tersebut menjadi sangat penting, karena lembaga tersebut merupakan suatu lembaga yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat yang mendasar pada kekuatan normatif atau *normative power* untuk melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan-kegiatannya, dengan menggunakan cara-cara persuasif. Dengan demikian masyarakat akan secara sukarela terlibat dalam proses pembangunan.

Di samping itu peran lembaga tersebut dalam melibatkan anggota masyarakat untuk berperan serta menjadi penting, karena melalui pelibatan langsung masyarakat, masyarakat akan mengetahui sejak awal setiap proses kegiatan, sehingga dengan demikian apabila kegiatan tersebut telah mengakomodir setiap keinginan masyarakat, apabila kelak mendapat hambatan, masyarakat akan merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk mencari pemecahannya. Karena apabila pelibatan masyarakat tersebut diabaikan, kemungkinan timbulnya gejolak dikemudian hari, bisa saja terjadi. Masyarakat dapat diorganisir untuk melawan struktur kekuasaan dengan cara apapun yang dianggap tepat dengan situasi dan kondisi yang ada, misalnya dengan demonstrasi, unjuk rasa, pemogokan bahkan dapat mengarah ke tindakan anarkis. Hal ini akan terjadi dengan sendirinya, sebagai akibat tidak ada bentuk partisipasi yang disediakan untuk masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa proyek rehabilitasi IPLT tersebut adalah proyek dari “ atas “ sehingga orang-orang tertentu saja yang mengetahui rencana tersebut. Dalam hal ini aparat Kelurahan, pengurus LKMD dan sebagian ketua RT/RW dan bilapun warga diajak dalam proses perencanaanya, hanya didelegasikan pada wakil-wakilnya yang dalam hal ini adalah pengurus LKMD dan wakil warga. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat banyak dipengaruhi oleh peran LKMD dan wakil warga. Dan dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa faktor-faktor tersebut dapat datang dari dalam masyarakat itu sendiri antara lain kemampuan dan kemauan masyarakat, maupun di luar masyarakat, yaitu adanya peran aparat untuk menumbuh kembangkan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Di lain pihak, juga adanya pengaruh persepsi sebagian masyarakat bahwa di era otonomi dan reformasi sekarang ini tak jauh beda dibanding dengan era sebelumnya, dimana segala kebijakan pembangunan masih ditentukan dari “ atas ” sehingga masyarakat hanya “ nrimo “ saja. Walaupun mereka diundang dan dilibatkan serta aktif memberikan masukan, hal itu akan sia-sia dan membuang waktu saja. Di samping itu, bahwa model pembangunan yang digunakan dalam proyek rehabilitasi Unit Pengolah Limbah Tinja tersebut tidak sepenuhnya menggunakan model partisipatif secara murni. Ini berarti, bahwa peran pemerintah dalam hal ini masih sangat besar.

Rendahnya partisipasi masyarakat di wilayah studi disamping karena proyek pembangunan rehabilitasi tersebut merupakan proyek *Top Down*, salah satu sebabnya karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pelaksana proyek. Pembangunan suatu proyek yang menyentuh kehidupan masyarakat, akan sangat menguntungkan apabila diawali dengan proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk pendekatan yang efektif dengan memperkenalkan kepada masyarakat atas segala

kegiatan pembangunan. Sehingga dalam hal ini pelaksana proyek perlu mengadakan pendekatan-pendekatan dengan warga masyarakat, mengingat begitu heterogennya masyarakat.

Sosialisasi yang efektif dilakukan, dapat diawali dengan *public display*, berupa pertemuan warga dalam suatu forum untuk memberikan gambaran tentang rencana proyek rehabilitasi IPLT. Tahap selanjutnya adalah dengar pendapat, sehingga hal-hal yang menjadi keinginan warga sedikit banyak dapat terwadahi atau terakomodasi. Oleh karena itu komunikasi tidak langsung maupun komunikasi langsung (*interpersonal*) merupakan komunikasi yang dapat lebih efektif untuk mencapai kesepakatan dan menyatukan pendapat. Kepiawaian berkomunikasi dengan warga merupakan tuntutan yang harus dimiliki oleh pelaksana proyek. Karena pada dasarnya sosialisasi merupakan bentuk pentransferan informasi-informasi yang akan dilaksanakan. Sehingga meskipun proyek tersebut menggunakan pendekatan *top down* tetapi kalau sejak awal masyarakat telah mengetahui dan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek, tidak menutup kemungkinan proyek tersebut berhasil guna dan berdaya guna.

4.3. Kajian Tingkat Efektivitas Partisipasi Masyarakat

Untuk melihat tingkat keefektifan warga untuk berpartisipasi dalam proyek rehabilitasi IPLT dalam upaya pengelolaan lingkungan, dalam sub bab ini posisi partisipasi masyarakat di wilayah studi, dapat dijelaskan melalui skala analisis sebagaimana dikemukakan oleh Moughtin (1992) (lihat Tabel IV.11), yang dapat terangkan sebagai berikut :

1. Teknik Partisipasi

Teknik partisipasi yang dilakukan masyarakat di wilayah studi, sebagaimana sub bab terdahulu adalah dengan melihat atau membaca pengumuman di Kelurahan serta media informasi lain seperti surat kabar, dengan menghadiri pertemuan warga, guna membahas rencana proyek rehabilitasi IPLT atau forum dengar pendapat warga dan dengan adanya badan perwakilan warga dalam hal ini LKMD, sehingga belum menampakkan adanya administrasi masyarakat, kemandirian pembangunan dan perencanaan serta perancangan oleh masyarakat.

2. Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi masyarakat yang terjadi di wilayah studi, dapat dimasukkan atau dikategorikan dalam kategori informasi, konsultasi dan penentraman.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab diatas, bahwa tingkat partisipasi masyarakat di wilayah studi masih tergolong rendah. Bentuk partisipasi yang ada belum menunjukkan pelibatan masyarakat secara aktif. Masyarakat hanya diberikan informasi melalui media yang ada. Konsultasi yang terjadi masih bersifat satu arah, yaitu dengan adanya rapat atau pertemuan yang membahas pembangunan proyek rehabilitasi IPLT dan segala keputusan belum berada ditangan warga. Sedang penentraman, karena suara warga hanya terwakili oleh lembaga yang ada yaitu LKMD, maka peran LKMD adalah sebagai lembaga wakil warga, sehingga suara-suara warga terwakili dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini, belum menampakan kemitraan, pelimpahan kekuasaan ataupun kontrol masyarakat.

3. Sistem Politik atau Sistem Pengambilan Keputusan

Mengingat bahwa keberadaan IPLT tersebut merupakan rencana pemerintah, maka hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mengetahui adanya rencana proyek rehabilitasi tersebut dan apabila terjadi pembahasan di tingkat Kelurahan, hanya wakil-

wakil warga saja yang diundang. Sehingga dalam hal ini, sistem politik yang ada dapat dikategorikan demokrasi perwakilan dan bukan demokrasi partisipatif.

4. Unit Spasial

Unit spasial di wilayah studi, dapat dikategorikan ke dalam spasial lingkungan. Lingkungan di Indonesia adalah suatu unit yang hampir sama besarnya dengan Kelurahan.

5. Bentuk Perencanaan

Skala bentuk perencanaan yang ada menyangkut program yang telah direncanakan dari atas atau dengan kata lain, skala bentuk perencanaan berada dalam konteks *bottom up planning* dalam tingkat yang terbatas, karena perencanaan di wilayah studi bersifat teknis dan banyak masyarakat yang tidak begitu memahaminya.

Bila digambarkan dalam tabel, maka partisipasi masyarakat dalam proyek rehabilitasi IPLT dalam upaya pengelolaan lingkungan di wilayah studi adalah sebagai berikut :

TABEL IV.11

SKALA ANALISIS PARTISIPASI MSYARAKAT DI WILAYAH STUDI

Teknik Partisipasi	Tingkat partisipasi	Sistem Politik/ Pengambilan Keputusan	Unit Spasial	Bentuk Perencanaan
Badan Pembuat Keputusan	Penentraman	Demokrasi Perwakilan	Lingkungan	Rencana Teknik
Pertemuan warga	konsultasi			
Pengumuman, Pamflet, surat kabar	informasi			

Sumber : Analisis Penulis, 2003

Dari tabel diatas, teknik partisipasi yang digunakan, dilaksanakan melalui pengumuman, pamflet, surat kabar, pertemuan warga dan dilakukan oleh badan pembuat keputusan dalam hal ini LKMD, menunjukkan tingkat partisipasi di wilayah studi

berbentuk informasi, konsultasi dan penentruman, sedang sistem politik yang digunakan adalah badan perwakilan, dengan menggunakan unit spasial lingkungan dan dalam hal perencanaan, di wilayah studi tidak terjadi perencanaan yang melibatkan warga dalam rencana proyek rehabilitasi IPLT, karena rencana yang terjadi bersifat teknis, sehingga masyarakat banyak tidak begitu mengetahui secara persis.

Bila dilihat dari teori yang kemukakan Moughtin (1992), bahwa di wilayah studi, karena unit spasial yang digunakan dalam studi ini adalah spasial lingkungan, maka tingkat partisipasi yang ada seharusnya kontrol masyarakat, pelimpahan kekuasaan dan kemitraan atau berada pada derajat kekuasaan masyarakat, dengan sistem politik demokrasi partisipatif dan teknik partisipasi yang digunakan adalah administrasi masyarakat, kemandirian pembangunan dan administrasi masyarakat, padahal pembangunan rehabilitasi IPLT tersebut dapat dikategorikan skala kota. Dengan demikian, maka proses partisipasi masyarakat yang terjadi di wilayah studi dapat dikategorikan kurang efektif.

UPT-PUSTAK-UNDIP

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari beberapa kajian partisipasi masyarakat yang telah diuraikan pada bab sebelumnya berdasarkan hasil survei dan pengamatan di wilayah studi, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini dan sebagai bahan masukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya, beberapa saran dan pertimbangan disajikan pula dalam bab ini.

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap program rehabilitasi IPLT di wilayah studi adalah partisipasi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam tahap perencanaan, partisipasi masyarakat dapat dikategorikan rendah. Rendahnya partisipasi pada tahap perencanaan ini, karena proyek rehabilitasi IPLT tidak menggunakan model pembangunan partisipatif secara penuh, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat saja yang terlibat dalam perencanaan. Dalam kaitan ini perencanaan rehabilitasi hanya diketahui oleh sebagian ketua RT/RW, aparat Kelurahan dan pengurus LKMD. Dengan demikian dapat dikatakan bentuk perencanaan pembangunan rehabilitasi ini menggunakan pendekatan *top down planning*, meskipun sangat terbatas. Masyarakat melalui wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan) telah diundang dalam berbagai pertemuan, diajak berdiskusi, diberikan informasi, tetapi segala kewenangan dan otoritas dalam pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi Unit Pengolah Limbah Tinja (IPLT), dikarenakan oleh pemerintah proyek tersebut telah diserahkan kepada kontraktor, maka aspek – aspek partisipasi masyarakat yang ada di wilayah studi seperti sumbangan tenaga, uang, material kurang melibatkan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan rehabilitasi IPLT di wilayah studi bersifat teknis, sehingga masyarakat banyak yang kurang memahami. Sumbangan yang ada berupa pemikiran dalam perubahan desain bangunan, yang dilakukan pada saat pelaksanaan proyek rehabilitasi, misalnya seperti konstruksi arah aliran masukan, arah aliran pembuangan akhir, jalur pipa *septic tank* komunal dengan sambungan rumah sehingga mengurangi pencemaran dan memudahkan penyedotan oleh petugas Dinas Kebersihan. Maka dengan demikian dalam tahap pelaksanaan ini, kecenderungan untuk berperan serta rendah karena teknis sekali.

Hal yang menarik didapat dari penelitian ini, bahwa di era euforia reformasi yang digulirkan, pembangunan yang bersifat *top down* walaupun tidak secara penuh masih dapat diterima oleh masyarakat. Karena pada dasarnya pembangunan rehabilitasi IPLT tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat Palembang pada umumnya dan masyarakat Kelurahan Sukajaya pada umumnya sebagai pemenuhan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dalam hal ini, telah ada suatu kesadaran dari masyarakat tentang arti pentingnya kondisi lingkungan yang sehat. Meskipun beberapa catatan tetap perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Misalnya mengelola keberadaan IPLT tersebut dengan sebaik- baiknya, sehingga sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat. Karena bagaimanapun juga proyek tersebut jika tidak dikelola dengan baik mudah menimbulkan gejala di masyarakat. Hal ini disebabkan meskipun pembangunan rehabilitasi IPLT tersebut telah menggunakan teknologi yang mutakhir, tetap memiliki resiko cemar yang cukup tinggi, sehingga tetap menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Sedikit ada

kebocoran atau luapan, bau yang menyengat yang timbul dari Unit Pengolah Limbah tersebut, masyarakat tidak segan-segan akan melayangkan protes kepada pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya yang serius dan profesional dalam pengelolaannya sehingga kendala-kendala tersebut dapat diminimalkan.

5.1.2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang terjadi di wilayah studi dipengaruhi oleh faktor dari dalam masyarakat (*internal factor*) yang meliputi faktor kemampuan dan kemauan masyarakat. Masyarakat di wilayah studi, dipandang cukup memiliki kemampuan untuk berperan serta, apabila dilihat dari faktor - faktor jenis kelamin, usia, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan dan mata pencaharian. Diantara faktor-faktor tersebut yang pengaruhnya cukup kuat (signifikan) adalah ;

- a. Jenis kelamin terhadap frekuensi kehadiran dalam rapat/pertemuan dan keaktifan dalam mengemukakan usulan,
- b. Usia terhadap frekuensi kehadiran dalam rapat/pertemuan, keterlibatan dalam desain bangunan, sumbangan uang dan masukan dalam perubahan desain.
- c. Tingkat pengetahuan terhadap frekuensi kehadiran dalam rapat/pertemuan, keaktifan dalam mengemukakan usulan, bentuk-bentuk usulan, keterlibatan dalam desain bangunan, sumbangan uang, sumbangan material dan masukan dalam perubahan desain bangunan
- d. Tingkat pendapatan terhadap bentuk – bentuk usulan, sumbangan uang, sumbangan material dan masukan dalam perubahan desain bangunan
- e. Mata pencaharian terhadap frekuensi kehadiran dalam rapat/pertemuan

faktor diluar faktor internal masyarakat yang cukup berpengaruh di wilayah studi adalah adanya peran aparat pemerintah dalam mendorong dan memotivasi masyarakat dengan cara menumbuh kembangkan arti peran serta masyarakat dalam setiap gerak langkah pembangunan yang akan dilaksanakan.

5.1.3. Efektivitas Partisipasi Masyarakat

Proses partisipasi masyarakat di wilayah studi, termasuk ke dalam tingkat *tokenisme*, yaitu pelibatan masyarakat dalam bentuk informasi, konsultasi dan penentraman. Masyarakat yang diberikan informasi, melauai pengumuman di Kelurahan, melalui LKMD, ketua RT/RW dan sura kabar serta pertemuan warga. Masyarakat diajak berkonsultasi melalui wakil-wakil masyarakat namun segala keputusan tetap berada pada pemrakarsa proyek yakni pemerintah. Dalam hal ini sistem yang ada yaitu melalui badan perwakilan.

Dalam studi ini, tahapan kegiatan yang ada mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, masih kurang melibatkan masyarakat, sehingga partisipasi cenderung rendah. Untuk itu partisipasi di wilayah studi dapat dikatagorikan *kurang efektif*. Karena pada dasarnya kegiatan akan efektif apabila semua tahapan kegaitan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. Kurang efektifnya partisipasi yang terjadi di wilayah studi, bentuk perencanaannya masih konseptual, sehingga pelibatan masyarakat masih kurang. Dalam tingkatn partisipasinya, sebagaimana dijelaskan diatas, masih bersifat informasi, konsultasi dan penentraman. Masyarakat hanya diinformasikan, diajak konsultasi tetapi belum mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan. Jadi belum adanya unsur kemitraan, pelimpahan kekuasaan dan kontrol masyarakat. Sedang teknik

partisipasinya belum menampakan adanya kemandirian dalam pembangunan, perencanaan dan perancangan oleh masyarakat.

5.2. Rekomendasi

Mengingat bahwa partisipasi merupakan proses dua arah, yakni proses dari pemerintah kepada masyarakat untuk melibatkan diri dari setiap kegiatan pembangunan yang ada, maka masalah partisipasi harus dan hanya dapat dimulai dengan kesediaan dan kemampuan masyarakat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Dalam hal ini perlu adanya keterbukaan informasi, terutama untuk proyek-proyek *top down*, sehingga hal-hal yang menjadi hambatan dapat segera diketahui dan hal-hal yang perlu dapat segera ditindaklanjuti.

Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan berkaitan dengan usaha-usaha peningkatan efektivitas partisipasi masyarakat antara lain :

5.2.1. Bentuk Perencanaan

Seperti halnya yang terjadi di wilayah studi, bahwa bentuk perencanaan yang ada merupakan perencanaan konseptual, sehingga pelibatan masyarakat dalam tahap ini cenderung rendah, maka untuk unit spasial lingkungan seperti halnya wilayah studi ini, akan lebih baik jika bentuk perencanaan yang ada, adalah rencana tindak. Dalam hal ini, perencanaan yang ada akan dapat mengakomodasikan keinginan masyarakat yang secara langsung dapat dilaksanakan.

5.2.2. Teknik Partisipasi

Teknik partisipasi yang ada haruslah mengedepankan perencanaan dan perancangan oleh masyarakat, jadi segala bentuk kegiatan yang dilakukan, akan dikerjakan oleh masyarakat, sehingga akan menciptakan kemandirian pembangunan.

5.2.3. Tingkat Partisipasi

Dalam tingkat ini, tingkat kekuasaan berada ditangan masyarakat, yaitu adanya kemitraan, pelimpahan kekuasaan dan kontrol masyarakat. Masyarakat sebagai mitra pemerintah, bukan sekedar dapat memberi masukan, tetapi kekuasaan berada di tangan masyarakat, sehingga perencanaan yang telah disusun, tidak ada yang dapat disahkan sebelum ada review dari warga masyarakat. Bila terjadi perbedaan atau pertentangan dalam perencanaan, dapat dinegosiasikan antara perencana dan warga masyarakat. Demikian halnya dalam pelimpahan kekuasaan, masyarakat memegang pertanggung jawaban atas program yang akan dijalankan dan kekuasaan pembuatan keputusan secara dominan berada di tangan warga, dengan demikian ada kontrol dari masyarakat.

Adapun rekomendasi tentang studi lebih lanjut sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- a. Karena objek penelitian ini juga mencakup skala kota, yakni pembangunan rehabilitasi Unit Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) diharapkan dapat melayani seluruh warga masyarakat, maka perlu adanya studi lanjutan yang dapat melibatkan seluruh masyarakat. Dengan kata lain, respondennya bukan pada skala lingkungan (Kelurahan) saja, tetapi seluruh masyarakat Kota Palembang.
- b. Karena pembangunan Unit Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) tersebut, ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, maka partisipasi masyarakat yang dapat diberikan adalah adanya retribusi sedot tinja, maka untuk itu perlu adanya penelitian lanjutan dalam hal penentuan tarif retribusi. Tujuan utama dari retribusi sedot tinja adalah untuk biaya operasional dan pengelolaan lingkungan. Dan yang penting adalah apabila retribusi tersebut hanya untuk menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) semata, maka mungkin

tidak terlalu sulit untuk menetapkan suatu angka. Namun harus dilihat pula kemampuan warga dalam hal pembayaran retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- Arstein, Sherry R.1995. *A Ladder of Citizen Participation* dalam Jay M Stein (ed), *Classic Reading in Urban Planning : An Introduction*. Mc. Graw-Hill. Inc. New York.
- Baross, Zsu Zsa.1993. *Prospek Perubahan bagi Golongan Miskin Kota dalam Parsudi Suparlan (ed). Kemiskinan di Perkotaan*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Budihardjo, Eko.1991. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Chadwick, Bruce A, Howard N & Stan L, Aberecht.1991.*Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. IKIP Semarang Press. Semarang.
- Conyers,Diana.1994. *Perencanaan Sosial di Dunia ke Tiga*. Gadjah Mada University Press.
- Daldjoeni, N.1992. *Seluk Beluk Masyarakat Kota : Pusparagam Sosiologi Kota & Ekologi Sosial*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Drucker, Peter, F.1978. *Manajemen : Tugas & Tanggung Jawab Praktek*. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- Gibson, Ivancevich, Donelly.1990. *Organisasi : Perilaku, Struktur & Proses*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Godschalk dalam Fageance.1997. *Citizen Participation in The Planning*. Pergamon Press. Oxford England.
- Harsey & Blanchard.1986. *Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*.Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Ickis, John C.1981. *Structural Responses to New Rural Development Strategy* dalam David C Korten & Felipe B Alfonso. *Bureaucracy ang The Poor : Closing The Gap*. Mc.Graw Hill International Book Company. Singapore
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Adminstrasi Pembangunan*. Penerbit LP3ES. Jakarta
- Kartono,Kartini.1996.*Pengantar Metodologi Riset Sosial*.Penerbit CV. Mandiri Jaya.Bandung
- Kusnoputranto, Haryoto.1997. *Air Limbah dan Ekskreta Manusia : Aspek Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaannya*. Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Litwin, Howard.1986. *Correlates of Community Collaburation*. In Yair Levi and Howard Litwin (Eds) *Community and Cooperative in Participatory Development*. Gover Publishing Company. England.
- Mardiasmo,.2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.Yogyakarta.
- Moughtin, James Clifford,. 1992. *Urban Design : Street and Square*. Oxford : Butterworth Heinemann Ltd.
- Natzir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. jakarta
- Nawawi, Hadari.1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu.1990. *Pembangunan masyarakat Mempersiapkan Masyarakat tinggal landas*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nurmandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan*. Penerbit Lingkaran Bangsa. Yogyakarta.
- Pabundu, Tika.1997. *Metode Penelitian Geografi*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Priyono, Onny S, dan A.M.W. Pranaka.1996. *Pemberdayaan : Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit CSIS. Jakarta.
- Rubin, Allen and Earl Babbie.1989. *Research Methords for Social Work*. Wadsworth Publishing Company. Bellmonth.
- Slamet, Y.1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Soedarno, P et al.1992. *Ilmu Sosial Dasar ; Buku Panduan mahasiswa*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sudjana,.1996. *Metode Statistik*. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Sugiarto, et.al. 2001. *Teknik Sampling*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suparlan, Parsudi.1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Yudohusodo, Siswono.1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Penerbit Yayasan padamu Negeri. Jakarta.

Kelompok Artikel

Goulet, Denis.1990. Partisipasi Dalam Pembangunan ; Terobosan baru, CSIS tahun XIX No.2 Maret – April 1990

Oetomo, Andi.1994. Mencari Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Kota di Indonesia. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota No.14

Terbitan Terbatas

Hadi, Sidharta P.1999. Manajemen Lingkungan Berbasis Kerakyatan dan Kemitraan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Yulianti, Rina. 2000. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Limbah. Dep. MTPK - Undip. Semarang

Anonymous. 1999. Peran Serta masyarakat dan Penyuluhan dalam Pengelolaan Air Limbah. Dirjen Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum.

Wibisono, Gunawan,. 1989. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Peremajaan pasar. Dep. MPWK- ITB. Bandung

Kelompok Makalah

Hadi, Sidharta P.1999. Peran Serta Masyarakat Dalam Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL, Makalah Seminar

Metcalf & Eddy, 1981. *Wastewater Engineering : Collection and Pumping of Wastewater.* Mc. Graw Hill Inc.

Santosa, M.A,. 1990. Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, Makalah seminar.

Kelompok Buku Data/Laporan

Anonymous. 2001. *Preparation of The Second Palembang Urban Development Program.* Bappeda Kota Palembang.

Anonymous. 2001. Palembang Dalam Angka. Kantor Statistik Kota Palembang.

Anonymous. 2002. Profil Kota Palembang Pusat Penelitian Tata Ruang Universitas Sriwijaya Palembang.

Anonymous. 2000. Kajian Pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) pada 5 (lima) Kota ; Palembang, Sekayu, Muara Enim, Batu Raja dan Lubuk Linggau. Pusat Penelitian Tata Ruang Universitas Sriwijaya. Palembang.

Kelompok Peraturan & Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga & Rukun Warga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.